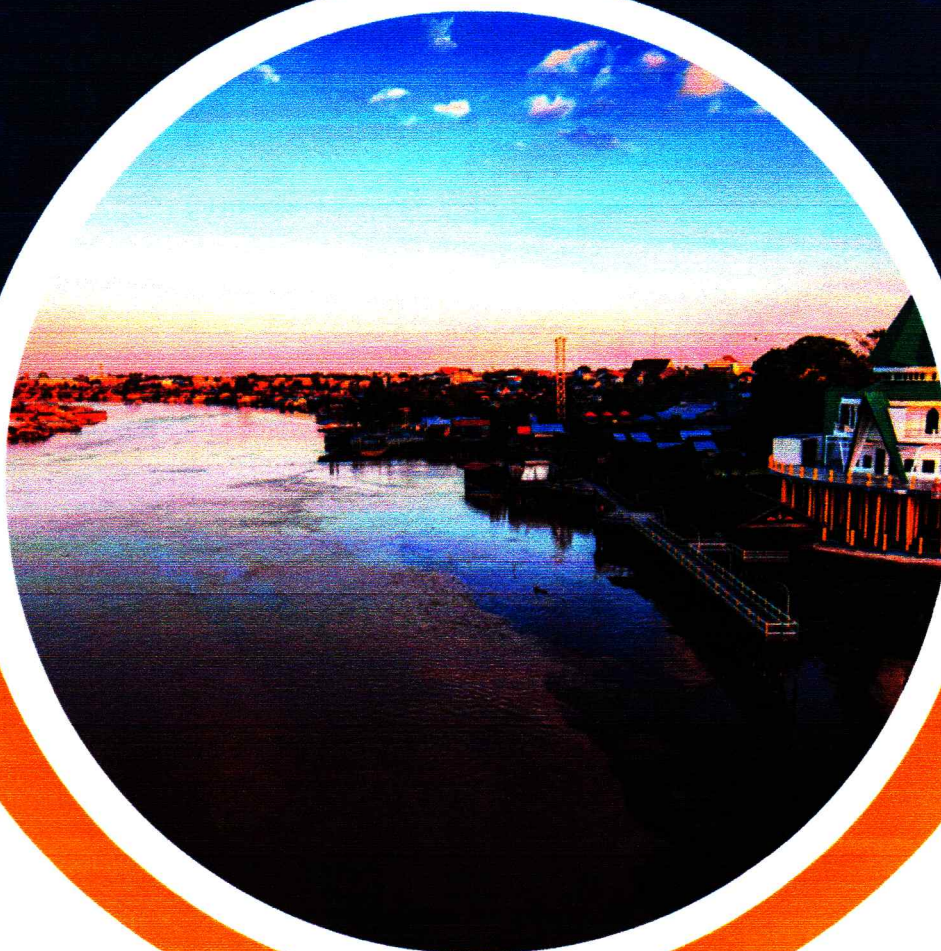




LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



TAHUN 2023

dibuat oleh :

BAGIAN ORGANISASI



[www.https://palangkaraya.go.id/.com](https://palangkaraya.go.id/.com)



setda@kotapalangkaraya.go.id



+ (0536) 3231496 – 3231478



Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu telah ditentukan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya ini merupakan media pertanggung jawaban yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang disampaikan secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Kota Palangka Raya dalam melaksanakan kegiatan.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. AKIP ini menyajikan informasi tentang ukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dalam pencapaian target kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama lima tahun dalam kerangka perwujudan tujuan RPJMD.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai Media pertanggungjawaban kinerja serta bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 28 Maret 2024

WALIKOTA PALANGKA RAYA,





Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan		
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum	4
D. Dasar Hukum	12
E. Prioritas dan Sasaran Pembangunan	14
Dearah		
F. Isu Strategis Kota Palangka Raya	15
G. Sistematika Penyajian	20
Bab II Perencanaan Kinerja		
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja		
A. Pengukuran Kinerja	36
B. Akuntabilitas Keuangan	114
Bab IV Penutup	122



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
INSPEKTORAT

Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463
PALANGKA RAYA 73112

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Palangka Raya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palangka Raya, 28 Maret 2024

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,



Ir. HAMBALI

Pembina Utama Muda

NIP. 19670602 199303 1 017



Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita – cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan kebijakan yang mengatur indikator kinerja dalam RPJMD. Telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Pemerintah Kota Palangka Raya dalam kurun waktu lima tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Adapun anggaran belanja yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp. 1.460.030.259.740,00 dan realisasi anggaran sebesar 1.326.550.654.745,85. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2023 ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan

tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk mencapai suatu kondisi yang diinginkan dan sasaran yang hendak dituju maka Pemerintah Kota Palangka Raya telah menetapkan RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.



Gambar 1.1 Kota Palangka Raya

Pemerintah mengharapkan dengan penetapan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang disusun dengan maksud dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkesinambungan. Dan setiap akhir tahun anggaran dapat dilakukan penelusuran realisasi apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan rencana kinerja melalui mekanisme pelaporan, salah satunya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud kewajiban penyelenggara pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam masa satu tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah dalam satu tahun kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah (PD) Kota Palangka Raya, mengacu pada Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dan Wakil Walikota Palangka Raya periode tahun 2018-2023, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Guna perbaikan Tata Kepemerintahan yang baik (*Good Government*) dan perbaikan kinerja, masih banyak kekurangan di dalam pemerintahan

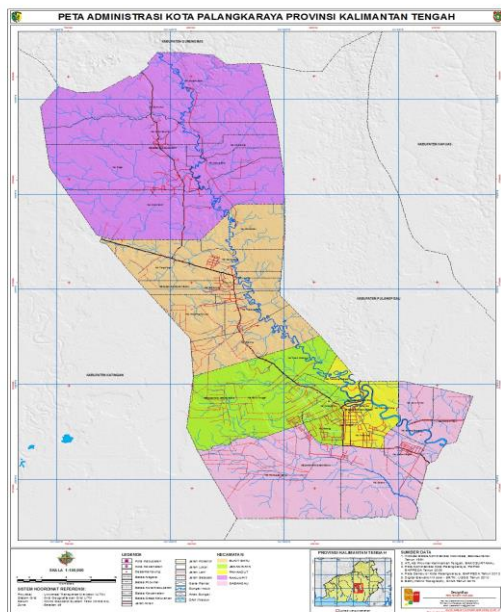
dalam rangka mencapai keberhasilan pencapaian sasaran secara maksimal.

3. Alat kendali untuk mengukur dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

C. GAMBARAN UMUM

Profil Kota Palangka Raya

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 73,74,75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km²



(285.351,28 Ha) Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan: Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat : Kabupaten Katingan Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km², Kecamatan

Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan dengan luas wilayah 1.101,95 Km².

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan, fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk, kecenderungan investasi. Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan 36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha; Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan luas kawasan 117.187 ha.



Gambar 1.2 Tugu Soekarno di Palangka Raya

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan

lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan, memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di Kota Palangka Raya, memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Keberadaan kota Palangka Raya memiliki sejarah yang cukup panjang dari adanya wilayah dan Pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan zaman. Berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9). Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut terbitlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor DES.52/12/2-206 tanggal 22 Desember 1959 tentang Pemindahan Tempat dan Kedudukan Pemerintah Daerah di Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut maka ditetapkan Pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dengan menjadikan Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan sektor ekonomi dan luasan wilayah, melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan Kecamatan yang masing-masing membawahi beberapa daerah pinggiran, Maka terbentuklah 5 (lima) Kecamatan

keseluruhannya terdiri atas Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, bukit Batu dan Rakumpit.



Profil Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya

Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023.

Fairid Naparin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 1985. Beliau menyelesaikan pendidikan SD di Palangka Raya pada 1997, pendidikan SMP di Palangka Raya pada tahun 2000 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Pangkalan Bun pada tahun 2003. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, beliau menyelesaikan pendidikan Strata 1 Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro pada tahun 2008.

Pada tanggal 24 September 2018, Fairid Naparin dilantik sebagai Walikota Palangka Raya bersama Wakil Walikota Hj. Umi Mastikah (periode 2018-2023) oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabran.



Wakil Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023

Umi Mastikah, lahir di Pati Jawa Tengah pada tanggal 16 November 1975. Beliau menyelesaikan pendidikan SD di Sekarjalak 1 di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah pada 1988, Diniyyah Ula Mathali'ul Falah Tahun 1991 (non formal*), Madrasah Tsanawiyah Gunem Rembang Tahun 1994, Madrasah Aliyah PGIP Hadiwijaya Tahun 1997 dan Menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Tahun 2004.

Pada tanggal 24 September 2018, Fairid Naparin dilantik sebagai Walikota Palangka Raya bersama Wakil Walikota Hj. Umi Mastikah (periode 2018-2023) oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabran.

Pj. Walikota Palangka Raya Periode 2023-2024

Hera Nugrahayu, lahir di Tanjungkarang pada tanggal 22 Agustus 1969. Beliau



menyelesaikan pendidikan SD di Bandung pada 1981, pendidikan SMP di Tanjungkarang pada tahun 1984 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Tanjungkarang pada tahun 1987. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, beliau menyelesaikan pendidikan Diploma III di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Tanjungkarang pada tahun 1990 dan melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Institusi Ilmu Pemerintahan (IIP) Depdagri-Jakarta pada tahun 1996 serta melanjutkan Pendidikan Magister di Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta pada tahun 1998.

Pada tanggal 25 September 2023, Hera Nugrahayu dilantik sebagai Pj. Walikota Palangka Raya diaula Jayang Tingan lantai III Kantor Gubernur oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabran.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dalam bentuk Sekretariat, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Daerah pinggiran serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan, tugas pokok dan fungsi. Adapun Organisasi yang Telah terbentuk adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Hukum
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b) Bagian Administrasi Pembangunan
- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

3. Asisten Administrasi Umum

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Organisasi
- c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



Gambar 1.3 Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Lembaga Teknis Daerah

- 1. Inspektorat
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

D. Dinas-Dinas

- 1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Komunikasi Informatika, Stastistik dan Persandian
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12. Dinas Perikanan
13. Dinas Parawisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19. Satuan Polisi Pamong Praja

E. Kecamatan

1. Pahandut
2. Jekan Raya
3. Sabangau
4. Bukit Batu
5. Rakumpit

F. Daerah pinggiran

1. Pahandut
2. Langkai
3. Pahandut Seberang
4. Panarung
5. Tumbang Rungan

6. Tanjung Pinang
7. Bukit Tunggai
8. Palangka
9. Menteng
10. Petuk Ketimpun
11. Kalampangan
12. Kameloh Baru
13. Kereng Bangkirai
14. Sabaru
15. Bereng Bengkel
16. Danau Tundai
17. Tangkiling
18. Marang
19. Tumbang Tahai
20. Sei Gohong
21. Kanarakan
22. Habaring Hurung
23. Banturung
24. Mungku Baru
25. Bukit Sua
26. Petuk Barunai
27. Panjehang
28. Gaung Baru
29. Pager
30. Petuk Bukit

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

E. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagaimana table 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023**

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya	Optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya untuk mewujudkan lingkungan cerdas	Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk terwujudnya masyarakat cerdas	Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera

F. ISU STRATEGIS KOTA PALANGKA RAYA

Berdasar analisis permasalahan yang tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, bahwa secara makro persoalan yang dihadapi Kota Palangka Raya adalah adanya ketidakmerataan antar sektor dalam perekonomian, yang itu bermakna ketidakmerataan kesejahteraan. Ketidakmerataan kesejahteraan itu kemudian berdampak luas pada aspek pendidikan, kesehatan, kemiskinan maupun kehidupan sosial budaya yang juga tidak merata. Ketidakmerataan kesejahteraan itu bersumber dari 5 (lima) pokok persoalan yakni adanya ketimpangan pola investasi. Pertanian sebagai sektor yang menghidupi sebagian besar penduduk kurang mendapat perhatian untuk investasi, akibatnya pertanian menjadi sumber kemiskinan.

Ketidakmerataan pembangunan itu juga bersumber dari ketidakmerataan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada penduduk. Sulitnya akses ke beberapa wilayah membuat tenaga berkualitas baik pendidikan, kesehatan maupun pelayanan umum lainnya enggan untuk ditugaskan di tempat tersebut. Akibatnya wilayah-wilayah yang terpencil itu akan tetap tinggal dalam kesulitan untuk berkembang. Penduduk atau petugas dari luar suatu wilayah adalah salah satu pendorong bagi munculnya perubahan, maka ketika aspek ini tidak ada, sementara penduduk lokal juga kurang memiliki akses keluar maka perubahan itu datangnya pasti akan sangat lambat.

Akibat dari masalah inti itu adalah aspek sosial, ekonomi maupun budaya tidak berkembang dengan baik di kota ini. Pada bidang pendidikan dan kesehatan terjadi ketidak merataan. Di sektor perkotaan kinerja pendidikan dan kesehatan relatif lebih baik dari pada di daerah pinggiran. Kurangnya berbagai fasilitas di sektor pertanian dan daerah pinggiran berdampak pada tingginya penduduk miskin di wilayah daerah pinggiran (sektor pertanian). Akibat dari semua itu adalah kurang berkembangnya kehidupan sosial budaya. Dalam keadaan miskin, tidak berpendidikan dan kurang sehat maka hal terpenting yang dikejar baru taraf kebutuhan dasar, sementara itu kehidupan sosial apalagi

budaya menjadi cukup sulit untuk dipikirkan. Tanpa pengetahuan yang cukup ditekan oleh kemiskinan maka penduduk akan memanfaatkan lingkungannya untuk segera memenuhi kebutuhan pokoknya, dengan demikian aspek keberlanjutan lingkungan kurang mendapat perhatian.

Analisis atas permasalahan yang telah diuraikan membawa pada isu strategis internal kota Palangka Raya yang harus diselesaikan untuk tahun tahun mendatang. Isu isu itu dapat dielaborasi sebagai berikut:

1. Kinerja pembangunan Sumber daya manusia yang dicapai kota Palangka Raya memang telah mencapai angka yang tinggi, namun demikian tingkat perkembangannya terus melambat. Artinya ditahun tahun mendatang, kota ini harus terus berjuang keras untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM.
2. IPM yang cenderung tidak beranjak salah satunya berasal dari kinerja pendidikan yang juga mengalami permasalahan, terutama berkaitan dengan terjadinya ketidak merataan kinerja pendidikan antar kecamatan. Program yang dibuat seragam antar kecamatan membuat kinerja kecamatan yang cukup terpencil menjadi sangat lambat. Kiranya perlu kembali dipertimbangkan program program yang lebih spesifik untuk kecamatan terpencil agar pelayanan tetap dapat diberikan dan kinerja outcome dapat dicapai.
3. Sejalan dengan kinerja IPM maka kinerja kesehatan terlihat cenderung mengalami perlambatan. Perlambatan ini antara lain disebabkan oleh bergesernya jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat. Sejalan dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, penyakit yang diderita masyarakatpun bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit degenerative. Menjadi sangat strategis bagi kota ini untuk mulai memperhatikan upaya preventif pengelolaan kesehatan selain upaya upaya yang telah dilakukan.
4. Tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif. Fluktuasi ini menerminkan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang. Salah satu sumber ketidak seimbangan itu adalah kualitas tenaga kerja yang tidak mampu memenuhi permintaan dunia kerja.

Disamping itu menurunnya kinerja sektor pertanian juga menjadi penyebab penting bagi terjadinya pengangguran. Untuk itu dim masa mendatang yang dibutuhkan adalah meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja selain terus meningkatkan kinerja sektor pertanian yang sesungguhnya merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi.

5. Kinerja penanggulangan kemiskinan masih ditandai dengan fluktuatifnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Fluktuatifnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan menjadi salah satu indikasi dari kurang efektifnya program program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu maka diperlukan evalusai yang serius terhadap program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 berdasarkan evaluasi penilaian keselarasan terhadap Visi Misi Kepala Daerah telah dilakukan penajaman dan keselarasan agar output dan outcome dapat merealisasikan Visi Misi tersebut dan menjadi solusi dalam menghadapi isi-isu strategis yang sedang berkembang sehingga dilakukan penertapan perubahan penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tahun 2021-2023 seperti tertuang dalam table dibawah ini :

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2021-2023

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur		Indesk Kualitas Infrastruktur
		1. Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (MISI)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)
		2. Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)
		3. Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		4. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)
2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indesk Kualitas Lingkungan Hidup
		5. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
3.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia
		6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup
		7. Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah
			Rata-Rata Lama Sekolah
		8. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	9. Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan
			Indeks Reformasi Birokrasi
		10. Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi
		11. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP
			Opini BPK
5.	Meningkatkan Kerukunan Dan Ketertiban Di Kalangan Masyarakat	12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM
		13. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan	Indeks Ketertiban dan Keamanan (IKK)
			Angka Kriminalitas
			Angka Konflik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
		Masyarakat (M2S8)	
6.	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi
		14. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
		15. Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi

Bentuk laporan akuntabilitas kinerja ini selain berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan surat keputusan kepala LAN nomor 239 Tahun 2003 tentang pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja instansi juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini ditekankan pada aspek capaian dari program, sasaran dan kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistematika Penyusunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan laporan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menyajikan secara ringkas visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab dari keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis/RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Komponen Rencana strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RPJMD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palangka Raya tahun 2018-2023.

Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kota Palangka Raya hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kota Palangka Raya adalah:

**” TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU,
RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan dengan analisis potensi keunggulan Kota Palangka Raya, maka disusunlah visi, misi, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun ke depan.

Dari visi tersebut dapat diidentifikasi 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU** adalah: Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk menjadi kota yang cerdas.

Meningkatnya kemandirian ekonomi kota menuju kota jasa yang berkelanjutan. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**

adalah: Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan bahtin melalui upaya pemanfaatan potensi sumberdaya oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan membangun kebersamaan dalam semua dimensi kehidupan.

Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kota Palangka Raya antara lain Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan antara visi dan misi Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Arah Misi
Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju	Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)	Pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Rukun	Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society (masyarakat Cerdas)	Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Sejahtera	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)	Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang diuraikan secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada sebagai berikut:

1. Misi Satu: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi. Ditetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan dan 5 (lima) Sasaran Pembangunan adalah:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas infrastruktur dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)
2. Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)
3. Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang ((M1S3)
4. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)

2. Misi Kedua: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan. Dengan 3 (tiga) Tujuan dan 8 (delapan) Sasaran Pembangunan:

Tujuan 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Sasaran Pembangunan yaitu: 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1) 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)

3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)
4. Menurunnya Kemiskinan (M2S4)

Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran Pembangunan yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5) 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6) 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)

Tujuan 5: Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)

3. Misi Tiga: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

Tujuan 6: Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)
2. Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2).

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya perlu menentukan kebijakan strategis dan menjalankan program-program yang ditetapkan. Aspek kepemimpinan strategis dan aspek perencanaan strategis menjadi penentu utama keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ini merupakan cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan di Kota Palangka Raya dan kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Kota Palangka Raya merupakan suatu cara pandang untuk menentukan tindakan masa depan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di Kota Palangka Raya yang merupakan terjemahan terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal Kota Palangka Raya yang disesuaikan dengan arahan kebijakan pembangunan nasional dan regional Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi dan arah kebijakan erat kaitannya dengan ke mana arah Kota Palangka Raya akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan ini merupakan hasil analisis situasi dan identifikasi isu strategis dan kecenderungan perkembangannya serta melakukan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam

pembangunan daerah sehingga dengan demikian melahirkan pemahaman terhadap substansi permasalahan yang dihadapi, dan kesadaran terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan langkah-langkah berikutnya seperti penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan untuk pengimplementasiannya.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh alur strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Beberapa kebijakan umum yang dijalankan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan daerah adalah sebagai berikut:

1. **Mengatasi permasalahan pembangunan:** Pembangunan diutamakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara riil terjadi di masyarakat maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. **Pemerataan:** Pembangunan selama lima tahun berjalan diutamakan pada pemerataan penyelenggaraan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mengatasi disparitas di wilayah Kota Palangka Raya;
3. **Pertumbuhan:** Pertumbuhan yang diharapkan mampu memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. **Berlandaskan Budaya Betang dan Berwawasan Lingkungan Hidup:** Seluruh proses pembangunan yang dijalankan mengedepankan religiusitas

masyarakat yang dan berlandaskan falsafah budaya Betang serta didasarkan pada pemanfaatan lingkungan secara bijak dan lestari. Kebijakan khusus dalam eksploitasi sumberdaya alam oleh pemerintah maupun swasta harus dibatasi dan dikendalikan untuk kualitas kehidupan generasi berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode 2021-2023 tertuang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya seperti terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran
yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023**

No.	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (M1S1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)
5.	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah
		Rata-Rata Lama Sekolah
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga	Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	SASARAN	INDIKATOR
	Kerja (M2S3)	
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP
		Opini BPK
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	Angka Kriminalitas
		Angka Konflik
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan dicapai. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya dan terencana sedemikian rupa sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Pelantikan Wali Kota Palangka Raya Periode 2018-2023



Pelantikan Pj. Wali Kota Palangka Raya

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 murni dan perubahan sebagai dasar acuan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan perubahan untuk menuju pada pencapaian Visi, Misi serta sasaran strategis Kota Palangka Raya.



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAIRID NAPARIN

Jabatan : WALIKOTA PALANGKA RAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, 13 Januari 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERA NUGRAHAYU

Jabatan : Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palangka Raya, 6 November 2023

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

Tabel. 2.4
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (M1S1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)	65
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	71,63
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)	80%
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)	76%
5.	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50
		Indeks Kualitas Air	70
		Indeks Kualitas Udara	75
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup	73,19
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah	11,10
		Rata-Rata Lama Sekolah	11,85
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan	9,66%

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi	B
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WTP
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM	A
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	Angka Kriminalitas	5,55
		Angka Konflik	15
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4,04
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,69
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,41
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi	350



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.1
INDIKATOR KINERJA

No.	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (MIS1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)
5.	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
		Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah
		Rata-Rata Lama Sekolah
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi

No.	SASARAN	INDIKATOR
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP
		Opini BPK
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	Angka Kriminalitas
		Angka Konflik
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi

Catatan: Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada sasaran Meningkatkan Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3) dengan indikator kinerja **Persentase Kecamatan Yang Terlayani Transportasi Umum (TU)** dinilai belum SMART sehingga untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut indikator Persentase Kecamatan Yang Terlayani Transportasi Umum (TU) disesuaikan menjadi **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Jasa Pelayanan Perhubungan”**.

Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Kriminalitas** pada sasaran Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8) dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **“Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang tertangani”**.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama. Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Palangka Raya dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus

sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tolak ukur skala peringkat kinerja tertuang sebagai berikut:

Tabel Skala Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Akuntabilitas kinerja diukur dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Data Kinerja dimaksud dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data. Kemudian capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Adapun target, ralisasi dan capaian kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA IKU PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (MIS1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)	65	66,75	102,69%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	71,63	78,95	110,21%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)	80%	80%	100%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)	76%	76%	100%	Sangat Tinggi
5.	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50	76,73	153,46%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air	70	46,92	67,03%	Sedang
		Indeks Kualitas Udara	75	86,97	115,96%	Sangat Tinggi
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup	73,19	73,70	100,70%	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah	11,10	14,99	135,05%	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Lama Sekolah	11,85	11,65	98,31%	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72	5,13	110,31%	Sangat Tinggi
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan (Persentase Menurunnya angka kemiskinan)	9,66%	4,71%	48,75%	Sangat Rendah

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100%	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP	B	B	100%	Sangat Tinggi
		Opini BPK	WTP	Dalam Proses Penilaian	N/A	N/A
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM	A	B	75%	Sedang
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	Angka Kriminalitas / Persentase Pelanggaran K3 yang tertangani	5,55 / 100%	100% Indikator K3	100%	Sangat Tinggi
		Angka Konflik / Peringkat Nasional Indeks Toleransi	15	Peringkat 33	-20 %	Sangat Rendah
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4,04	1,49	36,88%	Sangat Rendah
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,69	6,48	74,57%	Sedang
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,41	3,79	59,13%	Rendah
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi	350	454,9	129,97%	Sangat Tinggi

Catatan: Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada sasaran Meningkatkan Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3) dengan indikator kinerja **Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)** dinilai belum SMART sehingga untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut indikator Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU) disesuaikan menjadi **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Jasa Pelayanan Perhubungan”**.

Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Kriminalitas** pada sasaran Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8) dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti

hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **“Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang tertangani”**.

Hal ini juga berlaku pada indikator **Angka Konflik** dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut**.

A. Indeks Kualitas Infrastruktur Ke PU an

Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur ke PU an (IKPU) terbentuk dari penjumlahan capaian tiga indikator yaitu 40% panjang jalan dalam kondisi mantap, 30% panjang drainase dalam kondisi baik dan 30% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR. Hasil perhitungan penjumlahan tiga indikator pembentuk IKPU diperoleh hasil sebesar **66,75** dan jika dibandingkan dengan target sebesar 65 berarti capaian kinerja mencapai **102,69%**.

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara target kinerja dan capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut;

Tabel
Capaian indikator kinerja tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	63,5%	64,68%	101,86%
2.	Meningkatnya Kualitas SDA	Persentase Panjang Kanal Banjir dalam Kondisi Baik	47,0%	46,25%	98,40%-
		Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi	45,0%	36,76%	81,69%
3.	Meningkatnya Kualitas Drainase	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	61,0%	61,25%	100,41%

4.	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	75,0%	75,0%	100,00%
5.	Meningkatnya Kualitas Keciptakarya	Persentase Bangunan Laik Fungsi	1,07%	1,07%	100,00%
		Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak	96,0%	88,38%	92,10%
		Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Limbah Domestik Layak	85,0%	94,00%	110,60%

Dari tabel di atas mayoritas indikator sasaran telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap dari target sebesar 63,5% berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 64,68% atau capaian kinerja mencapai 101,86%. Ini berarti terdapat penambahan panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi total sepanjang 589,77 Km dan jalan kondisi tidak mantap menjadi berkurang menjadi sepanjang 322,06 Km (35,32%).
- b. Persentase Panjang Kanal Banjir dalam Kondisi Baik dari target sebesar 47,0% tercapai sebesar 46,25% atau capaian kinerja mencapai 98,40% atau terdapat panjang kanal banjir dalam kondisi baik sepanjang 58.980 km dari total panjang kanal banjir sepanjang 127.514 km.
- c. Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi dari target sebesar 45,0% tercapai sebesar 36,76% atau capaian kinerja mencapai 81,69% atau dari luas lahan pertanian sebesar 2.636,50 Ha yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya yang terlayani irigasi seluas 969,18 Ha.
- d. Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik dari target sebesar 61,0% terealisasi sebesar 61,25% atau capaian kinerja mencapai 100,41% dengan panjang drainase kondisi baik mencapai 1.116,99

Km (61,25%) sehingga panjang drainase kondisi belum baik berkurang menjadi 706,67 Km (38,75%).

- e. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR dari target sebesar 75,0% terealisasi sebesar 75,0% atau capaian kinerja mencapai 100%.
- f. Persentase Bangunan Laik Fungsi dari target sebesar 1,07% dengan capaian sebesar 1,07% atau capaian kinerja sebesar 100,00%.
- g. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak dari target sebesar 96,0% tercapai sebesar 88,38% atau dengan capai kinerja sebesar 92,10%.
- h. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Limbah Domestik Layak dari target sebesar 85,0% tercapai sebesar 94,0% atau dengan capaian kinerja mencapai 110,60%.

B. Indeks Kualitas Permukiman

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan dianalisa capaian kinerja antara target kinerja dan capaian kinerja terdapat dalam tabel berikut :

Tabel

**REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM SKPD TAHUN 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Capaian Kinerja IKU Kepala Daerah
		Tahun
1	Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	61,74
2	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh yang tertangani	28,91
	TOTAL CAPAIAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH)	90,65%
3	Persentase Panjang Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	109
4	Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	25,47
	RATA - RATA CAPAIAN PSU	67,24
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DAERAH		(90,65 + 67,24)
		2
		78,95%

C. Persentase Kecamatan yang Terlayani Transportasi Umum

Tabel Capaian Kinerja Kepala Daerah

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum (TU)	-	-	-	60	60%	80	100%

Untuk capaian persentase Kecamatan yang terlayani transportasi umum pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 80% wilayah kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya. Dimana kecamatan di Kota Palangka Raya ada 5 Kecamatan, dan 4 Kecamatan telah terjangkau dan terlayani transportasi umum antara lain : Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan 1 Kecamatan yang masih belum terlayani transportasi umum yaitu Kecamatan Rakumpit. Dimana Kecamatan Rakumpit ini sebagian besar wilayahnya berada di jalur sungai.

D. Persentase Wilayah (Kelurahan) yang Terkoneksi Jaringan Internet

Rumusan Sasaran yang ditetapkan dan di analisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		Capaian Kinerja	Ket
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI)	76	76	100	Sangat Baik

Dari tabel di atas semua indikator yang mencapai target, dan melebihi target yaitu :

1. Persentase wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI) adalah 23 Kelurahan yang terkoneksi jaringan internet dari 30 Jumlah Kelurahan dari Target 76 % dengan realisasi 76%.

E. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Kualitas Air dan Kualitas Udara

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja IKU Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 diperoleh persentase capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah melebihi target dengan capaian sebesar 153,46 % yang berarti bahwa kualitas tutupan lahan di Kota Palangka Raya masih sangat baik. Lain halnya dengan Indeks Kualitas Air yang mengalami penurunan dari target dengan capaian 67,03 % dimana banyak faktor yang menyebabkan penurunan capaian tersebut salah satunya masih banyak warga yang tinggal di bantaran sungai yang membuang limbah kegiatan kesehariaan nya langsung ke sungai. Namun untuk Indeks Kualitas Udara pada Tahun 2023 ini mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 115,96%, hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Palangka Raya masih sangat-sangat bagus dan minim dari terjadinya polusi atau pencemaran udara.

F. Angka Harapan Hidup

[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2021-2023



Data series subyek **Indeks Pembangunan Manusia** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : **2021-2023** 2018-2020 2015-2017 2012-2014 2010-2011

Search:

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	69,79	70,04	70,27
Kotawaringin Barat	70,68	70,98	71,28
Kotawaringin Timur	69,90	70,15	70,39
Kapuas	68,78	69,02	69,23
Barito Selatan	67,19	67,48	67,75
Barito Utara	71,30	71,50	71,68
Sukamara	71,56	71,80	72,03
Lamandau	69,39	69,62	69,84
Seruyan	69,26	69,46	69,63
Katingan	65,87	66,16	66,43
Pulang Pisau	68,10	68,36	68,60
Gunung Mas	70,46	70,72	70,96
Barito Timur	68,31	68,61	68,91
Murung Raya	69,53	69,75	69,94
Palangka Raya	73,24	73,47	73,70
Sumber: BPS			

Showing 1 to 15 of 15 entries

Capaian realisasi angka harapan hidup pada tahun 2023 seperti pada tabel di atas telah mencapai target 73,70 Tahun. Dimana hal ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam IKU tahun 2023 sebesar 73,19 Tahun. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat harapan hidup di Kota Palangka Raya berada pada umur 73 hingga 74 tahun.

G. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dalam pencapaian indikator harapan lama sekolah yang tertera pada tabel diatas telah berada pada nilai 14,99 tahun. Hal ini berbanding dengan target dengan nilai 11,10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa gap antara target dan realisasi nya sebesar 3,89 Tahun. Dan hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pendidikan telah berhasil.

Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2021-2023

[back](#)
[xlsx](#)

Data series subyek Indeks Pembangunan Manusia juga dapat diakses melalui [Fitur Tabel Dinamis](#).

Data Series : [2021-2023](#) [2018-2020](#) [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2010-2011](#)

Search:

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	12,74	12,75	12,76
Kotawaringin Barat	12,73	12,75	12,77
Kotawaringin Timur	12,85	12,86	12,88
Kapuas	12,93	12,94	12,96
Barito Selatan	12,66	12,67	12,80
Barito Utara	12,50	12,53	12,54
Sukamara	12,13	12,15	12,16
Lamandau	12,49	12,51	12,52
Seruyan	12,00	12,02	12,03
Katingan	12,81	12,97	12,98
Pulang Pisau	12,42	12,50	12,51
Gunung Mas	11,90	11,91	12,05
Barito Timur	12,84	12,86	12,87
Murung Raya	11,76	11,87	12,04
Kota Palangka Raya	14,96	14,97	14,99

Tabel Rata-Rata Lama Sekolah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
					2023	2023
1.	Meningkatnya Mutu dan Partisipasi Pendidikan di Kota Palangka Raya	Rata-Rata Lama Sekolah	11,85	11,85	11,65	98,31 %

Dalam pencapaian indikator rata-rata lama sekolah yang tertera pada tabel diatas hanya berada pada nilai 11,65 tahun. Hal ini berbanding dengan target dengan nilai 11,85 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pencapaian dalam rata-rata lama sekolah masih perlu perhatian lagi hingga mampu mencapai dari target yang telah ditetapkan.

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023			
back xlsx			
Data series subyek Tenaga Kerja juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis .			
Data Series : 2021-2023 2018-2020 2015-2017 2012-2014 2011-2011			
Search: <input type="text"/>			
Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kalimantan Tengah	4,53	4,26	4,10
Kotawaringin Barat	4,70	4,51	4,45
Kotawaringin Timur	5,15	5,00	4,77
Kapuas	4,91	3,91	3,66
Barito Selatan	4,16	3,53	4,33
Barito Utara	5,14	4,82	4,85
Sukamara	4,65	6,46	5,23
Lamandau	2,30	3,41	3,32
Seruyan	4,25	3,96	3,61
Katingan	5,50	5,33	4,96
Pulang Pisau	2,60	1,96	2,07
Gunung Mas	3,11	2,96	3,24
Barito Timur	3,22	2,95	3,37
Murung Raya	3,03	2,77	2,75
Palangka Raya	5,86	5,64	5,13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota			
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			

Untuk Capaian Kinerja tahun 2023 dapat terlihat pada Tabel dibawah ini yang berisi target, realisasi dan capaian 2023 serta kesesuaian dengan RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2018– 2023.

TABEL

PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Data BPS	5,72	5,13*	110,31

Berdasarkan data BPS Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,13 persen hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja yang bukan anak sekolah, ibu rumah tangga, maupun lansia, terdapat lima sampai enam orang pengangguran.

I. Angka Kemiskinan

4.4 KEMISKINAN POVERTY

Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palangka Raya, 2016-2023
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Palangka Raya Municipality, 2016-2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Poverty Line (Rupiahs/Capita/Month)	Persentase Penduduk Miskin Poverty Percentage (Po)	Penduduk Miskin Number of Population Below Poverty Line (000)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	324.082	3,75	9,96
2017	345.417	3,62	9,90
2018	353.853	3,47	9,78
2019	379.420	3,35	9,69
2020	485.635	3,44	10,22
2021	456.276	3,75	10,86
2022	485.800	3,61	10,62
2023	530.223	3,44	10,31

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

INDIKATOR PEMDA	FORMUIA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
Angka Kemiskinan (Persentase Menurunnya angka kemiskinan)	Menurunnya Angka Kemiskinan Berdasarkan Data BPS	9,66%	4,71%*)	48,75%

*)Realisasi tahun 2023 sebesar 4, 71 % merupakan persentase penurunan angka kemiskinan yang diperoleh dari angka kemiskinan berdasarkan data BPS dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada tahun 2022, angka kemiskinan Kota Palangka Raya sebesar 3,61 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.620 jiwa. Pada tahun 2023, angka kemiskinan kota Palangka Raya sebesar 3,44% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.310. Sehingga Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,71 % dengan capaian 48,75%.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan predikat B, Kota Palangka Raya telah memperoleh predikat B. Dimana nilai yang diperoleh pada Tahun 2023 sebesar 65,07 poin. Dimana untuk penilaian pada Tahun 2023 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun sebelumnya penilainya masih menggunakan aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan pada tahun 2023 ini menggunakan aplikasi PORTAL RB yang memfokuskan pada penilaian RB General dan RB Tematik.

K. Nilai SAKIP

Pada Tahun 2023 target Nilai SAKIP yang ditetapkan dalam RPJMD yakni predikat B dengan realisasi yang diperoleh yakni predikat B (62,08). Untuk trend peningkatan nilai SAKIP Kota Palangka Raya memang tidak meningkat secara signifikan. Namun kedepannya diharapkan Nilai SAKIP Kota Palangka Raya dapat menembus angka 70,00 atau predikat BB dimana seluruh Perangkat Daerah dan pimpinan Daerah harus berkomitmen penuh dalam peningkatan kualitas SAKIP di Kota Palangka Raya.

L. Opini BPK

Pada tahun 2023 penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum memiliki opini, hal ini disebabkan masih belum keluarnya hasil penilaian dari BPK RI. Untuk penilaian yang ada, digunakan Opini Penilaian Tahun 2022 dimana Kota Palangka Raya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

M. IKM

Pada Tahun 2023 Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Palangka Raya dilaksanakan dalam 1 (satu) periode. Nilai IKM Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 sebesar 84,50 dengan kategori nilai B (Baik). Jumlah Responden dalam penyelenggaraan SKM di Tahun 2023 merupakan hasil penjumlahan responden pada survei yang dilaksanakan perangkat daerah pada tahun 2023. Secara keseluruhan jumlah responden masyarakat yang berpartisipasi

dalam SKM tahun 2023 sebanyak 5.462 jiwa/orang. Penyelenggaraan SKM Kota Palangka Raya Tahun 2023 dilakukan dengan metode kombinasi Manual dan Online. Penggunaan metode online sebagai upaya mempermudah dan mempercepat layanan dengan menggunakan teknologi, sedangkan penggunaan metode manual dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang memang melakukan pelayanan di lapangan dan memiliki kendala penggunaan teknologi.

Nilai IKM Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang terwakili oleh 4 (empat) Unit Pelayanan Publik secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Nilai IKM Unit Pelayanan Publik Kota Palangka Raya Tahun 2023

No.	Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori
1.	Sekretariat Daerah	87,02	B (Baik)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,20	A (Sangat Baik)
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,39	B (Baik)
4.	Dinas Sosial	83,39	B (Baik)

N. Angka Kriminalitas

*Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Kriminalitas** pada sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8) dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **“Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang tertangani”**.*

Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023 disajikan dalam tabel indikator, realisasi dan capaian ditampilkan rekapitulasi jumlah pelanggaran dan penanganan Perda/Perkada melalui pengaduan masyarakat, penertiban perijinan serta melalui patroli ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Tahun 2023 yang disebut dengan Pelanggaran K3.

TABEL
INDIKATOR, REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2023

No.	Indikator	Target Indikator	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Pelanggaran K3	100	100	100%
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama				100%

Penanganan Pelanggaran K3 dilakukan dengan cara melakukan penertiban dan pengawasan kepada pelaku usaha yang belum atau tidak memiliki ijin serta sejumlah Pelanggar Protokol Kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan patroli dan pengecekan langsung ke masyarakat serta pelaku usaha di lokasi kegiatan dalam wilayah Kota Palangka Raya.

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 adalah Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani/Jumlah Kejadian Pelanggaran K3 x 100% dan mendapatkan hasil 100 dengan jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani serta Jumlah Kejadian Pelanggaran K3 adalah 500 pelanggaran, dengan perbandingan capaian antara target dan realisasi senilai **100%**. hal ini didasari dengan jumlah pengaduan dan pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani yang mana semua pelanggar diberikan himbauan agar dapat menyelesaikan kekurangan terhadap perijinan-perijinan yang perlu dituntaskan maupun diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perda maupun Perkada.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur Pelanggaran K3 adalah:

1. Penertiban Perijinan; dan
2. Peningkatan Kerjasama dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Perda maupun Perkada di wilayah Kota Palangka Raya.

Solusi dalam Penegakan Peraturan daerah ini untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mencapai keberhasilan adalah dengan cara:

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengecekan untuk Penertiban Perijinan di Wilayah Kota Palangka Raya perlu dilakukan lebih intensif lagi dalam usaha pencapaian peningkatan PAD Kota Palangka Raya.
2. Melalui Kegiatan Pengawasan dan Pengecekan untuk Penertiban Perijinan di Wilayah Kota Palangka Raya diharapkan dapat memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha maupun masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya.

Capaian Kinerja pada indikator ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan yaitu **sangat berhasil**.

O. Angka Konflik

*Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Konflik** dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut**.*

19	Yogyakarta	3,83	0,383	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	6,00	0,900	3,00	0,150	4,00	0,400	5,433
20	Malang	4,50	0,450	5,60	1,120	6,00	1,200	5,00	0,500	6,00	0,600	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,370
21	Madiun	3,83	0,383	6,85	1,370	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,353
22	Batu	5,00	0,500	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,300
23	Jayapura	4,83	0,483	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,283
24	Probolinggo	4,67	0,467	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	5,267
25	Cimahi	4,67	0,467	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,257
26	Denpasar	4,33	0,433	7,00	1,400	6,00	1,200	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	5,00	0,250	5,00	0,500	5,233
27	Palu	4,17	0,417	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,217
28	Batam	4,00	0,400	6,70	1,340	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	5,00	0,500	5,190
29	Tegal	5,17	0,517	6,85	1,370	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	4,00	0,600	2,00	0,100	4,00	0,400	5,187
30	Sorong	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	3,00	0,450	4,00	0,200	5,00	0,500	5,183
31	Sibolga	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	5,00	0,750	4,00	0,200	3,00	0,300	5,183
32	Tanjung Pinang	5,83	0,583	6,50	1,300	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	3,00	0,300	5,183
33	Palangkaraya	4,50	0,450	6,85	1,370	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	5,00	0,250	4,00	0,400	5,170
34	Samarinda	3,50	0,350	6,35	1,270	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	4,00	0,400	5,170
35	Kendari	2,67	0,267	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	5,00	0,500	5,167
36	Bitung	4,50	0,450	7,00	1,400	7,00	1,400	4,00	0,400	4,00	0,400	3,00	0,450	5,00	0,250	4,00	0,400	5,150
37	Tangerang	3,50	0,350	6,45	1,290	6,50	1,300	4,00	0,400	5,00	0,500	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,140
38	Pangkal Pinang	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,133
39	Mojokerto	4,33	0,433	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,133
40	Tarakan	4,17	0,417	6,20	1,240	6,50	1,300	5,00	0,500	5,00	0,500	5,00	0,750	4,00	0,200	2,00	0,200	5,107
41	Tual	4,00	0,400	7,00	1,400	7,00	1,400	3,00	0,300	4,00	0,400	4,00	0,600	4,00	0,200	4,00	0,400	5,100
42	Pare Pare	4,00	0,400	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	4,00	0,400	5,00	0,750	3,00	0,150	3,00	0,300	5,100
43	Binjai	3,83	0,383	7,00	1,400	6,50	1,300	4,00	0,400	3,00	0,300	5,00	0,750	3,00	0,150	4,00	0,400	5,083

Indeks Kota Toleransi Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh SETARA *Institute for Democracy and Peace* menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya berada pada urutan ke 33 dari 94 Kota yang ada di Indonesia. Dari target yang di tetapkan yakni Angka Konflik diubah menjadi Peringkat Nasional Indeks Toleransi. Perbandingan target 15 dengan capaian peringkat Indeks Toleransi ke 33 maka capaian nya sebesar -20%.

P. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri

Tabel	12.4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2011 Menurut Lapangan Usaha di Kota Palangka Raya (persen), 2019-2023				
Table		Growth Rate of Gross Domestic Product at 2011 Constant Market Prices by Industry in Palangka Raya Municipality (percent), 2019-2023				
	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Industrial Origin					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	6,75	4,71	6,59	1,42	1,49
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6,56	-4,35	6,06	6,40	6,13
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2,83	-2,91	1,06	-2,81	3,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	15,53	0,36	1,61	4,83	7,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	4,72	-4,35	8,44	2,26	4,97
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4,73	-8,68	10,44	9,42	8,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,28	-2,35	4,11	7,35	6,48
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,19	-16,17	9,35	18,23	8,64
I	Perumahan, Akomodasi, dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,91	-11,08	5,53	16,82	8,12
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,74	12,87	17,89	3,04	3,28

Pada indikator PDRB sektor pertanian mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan dan hanya memperoleh capaian sebesar 36,88%. Untuk indikator PDRB Sektor Perdagangan juga masih belum mencapai target yang ditetapkan dan hanya mencapai 74,57%. Hal ini juga sama dengan perolehan capaian Pertumbuhan PDRB Sektor Industri yang hanya mencapai 59,13% dari target yang telah ditetapkan.

Q. Nilai Investasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023.

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	350 M	454,93 M	129,98 %

1. Nilai Investasi

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia, nilai investasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 454,93 Milyar. Basis perhitungan nilai investasi tersebut adalah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha selama tahun 2023. Dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp 350 Milyar, capaian tersebut menyentuh angka 129,98% dengan interpretasi sangat memuaskan.. Jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2022, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp 110,18 M pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi yang bagus bagi prospek perekonomian Palangka Raya. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir investasi terus tumbuh positif. Pada tahun 2021 investasi tumbuh sebesar Rp 135,36 M dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 investasi tumbuh Rp 107,49 M dibandingkan dengan tahun 2021.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

TABEL
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA IKU PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
ANTARA TAHUN SEBELUMNYA

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (M1S1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)	63	64,46	64	66,19	65	66,75
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	65,30	67,18	68,46	68,62	71,63	78,95
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)	60%	60%	60%	60%	80%	80%
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)	63%	63%	70%	73%	76%	76%
5.	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50	77,28	50	77,07	50	76,73
		Indeks Kualitas Air	70	50	70	54	70	46,92
		Indeks Kualitas Udara	75	90,53	75	90,82	75	86,97
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup	73,17	73,24	73,19	73,47	73,19	73,70
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah	11,06	14,96	11,07	14,97	11,10	14,99
		Rata-Rata Lama Sekolah	11,80	11,53	11,84	11,55	11,85	11,65
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84	5,86	5,78	5,64	5,72	5,13
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan (Persentase menurunnya angka kemiskinan)	9,72%	-9,01%	9,69%	3,73%	9,66%	4,71%
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	B	B	B

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP	CC	B	CC	B	B	B
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses Penilaian
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM	B	B	A	B	A	B
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	Angka Kriminalitas / Persentase Pelanggaran K3 yang tertangani	5,75	1,54	5,60	534/382 = 1,39	5,55/ 100%	100% Indikator K3
		Angka Konflik / Peringkat Nasional Indeks Toleransi	15	16	15	17	15	Peringkat 33
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4,06	7,18	4,05	1,42	4,04	1,49
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,99	4,10	8,86	7,35	8,69	6,48
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,16	0,69	6,31	-2,81	6,41	3,79
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi	255	237,27	295	344,76	350	454,9

A. Indeks Kualitas Infrastruktur Ke PU an

Dari tabel Indeks Kualitas Infrastruktur ke PU an (IKPU) terlihat bahwa capaian realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2021 capaian realisasi IKPU mencapai 64,46, dan pada tahun 2022 capaian realisasi IKPU mencapai 66,19 serta pada tahun 2023 ini capaian realisasi IKPU mencapai 66,75. Perbandingan capaian Realisasi tahun 2021 dengan 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,73 poin dan perbandingan antara 2022 dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,56 poin. Secara keseluruhan capaian realisasi ini mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur yang ada di Kota Palangka Raya telah meningkat menjadi lebih baik. Hal ini tertuang dalam indikator sasaran persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap, Panjang kanal banjir dalam kondisi baik, luas lahan pertanian terlayani irigasi, Panjang drainase dalam kondisi baik, kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR, bangunan laik fungsi, rumah tangga memiliki akses air minum layak dan rumah tangga memiliki akses air limbah domestik layak yang hampir semua telah melebihi target yang telah dicapai.

B. Indeks Kualitas Permukiman

Dari tabel indikator Indeks Kualitas Permukiman (IKPR) terlihat bahwa realisasi 2021, 2022 dan 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Dimana capaian realisasi 2021 telah mencapai 67,18 dari target 65,30. Pada tahun 2022 capaian realisasi IKPR 68,62 juga melebihi target 68,46. Serta tahun 2023 juga melebihi target yang telah ditetapkan yakni mencapai 78,95. Perbandingan capaian realisasi dari tahun 2021 dengan 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,44 poin, sedangkan perbandingan capaian realisasi antara tahun 2022 dengan 2023 mengalami peningkatan yang lumayan signifikan sebesar 10,33 poin. Peningkatan capaian realisasi tersebut tidak lepas dari capaian rumah layak huni di Kawasan permukiman kumuh yang tertangani dan Peningkatan rumah layak huni di Kawasan kumuh yang tertangani telah banyak yang terselesaikan. Selain dua indikator diatas tadi ada dua indikator lagi yang menjadi poin peningkat keberhasilan IKPR yakni Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dan Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dimana pelaksanaannya telah tercapai dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

C. Persentase Kecamatan yang Terlayani Transportasi Umum

Perbandingan persentase kecamatan yang terlayani transportasi umum di wilayah kecamatan Kota Palangka Raya dari tahun 2021 hingga 2023 selalu tercapai 100%. Dimana Pada tahun 2021 target dan realisasi yang tercapai sebesar 60% atau sekitar 3 wilayah kecamatan yang terlayani transportasi umum. Pada Tahun 2022 target dan realisasi yang tercapai masih sebesar 60% atau masih sekitar 3 wilayah yang kecamatan yang terlayani transportasi umum. Namun pada tahun 2023 telah tercapai 80% dari target dan realisasi nya atau dengan kata lain bahwa sudah 4 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya telah terlayani transportasi umum.

D. Persentase Wilayah (Kelurahan) yang Terkoneksi Jaringan Internet

Dari tabel Persentase wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI) terlihat bahwa setiap target telah tercapai bahkan melebihi target. Hai ini dapat dilihat dari target Persentase wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI) tahun 2021 sebesar 63 % dengan capaian realisasi sebesar 63%. Namun pada tahun 2022 capaian realisasi melebihi target, dimana target Persentase wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI) sebesar 70% dengan capaian realisasi sebesar 73%. Sedangkan untuk tahun 2023 capaian realisasi Persentase wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI) telah mencapai target sebesar 76%. Penyebab tidak semua wilayah (kelurahan) terkoneksi Jaringan Internet, disebabkan masih ada beberapa Kelurahan yang jalur transportasinya melalui jalur air yang menyebabkan masih belum bisa terkoneksi internet di Kelurahan tersebut.

E. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Kualitas Air dan Kualitas Udara

Perbandingan indeks kualitas tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara dari tahun ke tahun bergerak secara naik turun. Seperti pada indeks kualitas tutupan lahan, pada tahun 2021 realisasi yang dicapai sebesar 77,28, pada tahun 2022 sebesar 77,07 dan tahun 2023 sebesar 76,73. Dapat dilihat dari realisasi tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan indeks kualitas air yang dimana realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 50, pada tahun 2022 sebesar 54 dan tahun 2023 sebesar 46,92. Pada indeks

kualitas air ini capaiannya ada yang meningkat adapula yang mengalami penurunan. Capaian realisasi pada kualitas udara pada tahun 2021 sebesar 90,53 dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 90,82 namun menurun capaiannya pada tahun 2023 sebesar 86,97. Banyak faktor yang menyebabkan menaik atau menurunnya indeks tersebut, seperti halnya capaian kualitas air yang menurun disebabkan masih banyak Masyarakat di Kota Palangka Raya yang tinggal di jalur air yang membuang limbah sehari-hari langsung ke sungai, serta disebabkan masih adanya penambangan liar dibantaran Sungai. Untuk faktor indeks kualitas udara yang mengalami kenaikan atau penurunan salah satunya disebabkan adanya kebakaran lahan ataupun terjadinya kebakaran hutan, lahan, rumah atau pemukiman yang menyebabkan kualitas udara sedikit terpengaruhi.

F. Angka Harapan Hidup

Pada tabel angka harapan hidup di atas dapat terlihat bahwa angka/umur harapan hidup di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan seperti pada tahun 2021 angka harapan hidup mencapai angka 73,24 dan pada tahun 2022 mencapai angka 73,47 sedangkan tahun 2023 mencapai angka 73,70. Dari capaian tersebut menggambarkan bahwa harapan hidup di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan dengan kata lain bahwa umur Masyarakat di Kota Palangka Raya semakin bertambah Panjang dan bertambah sehat.

G. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Perbandingan Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun berdasarkan tabel di atas, didapati bahwa untuk harapan lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan nilai 14,99 tahun. Ini berarti anak-anak di Kota Palangka Raya yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma III. Lain hal nya dengan rata-rata lama sekolah di Kota Palangka Raya. Untuk perbandingan realisasi dibandingkan dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan, Namun dari seluruh target yang di tetapkan semua capaian realisasi masih belum bisa mencapai target yang ada. Dan untuk tahun 2023 rata-rata lama sekolah mencapai nilai 11,65 tahun. Ini berarti bahwa anak-anak usia pendididkan di Kota Palangka Raya akan mengenyam Pendidikan selama 11,65 tahun. Rata-rata lama sekolah didefinisikan

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah memiliki nilai minimum 0 tahun dan nilai maksimum 15 tahun.

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka berada pada titik 5,86 dan pada tahun 2023 ini berada pada titik 5,13. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka dengan berbagai macam program guna mendukung penurunan tingkat pengangguran yang ada. Antara lain yang dilakukan yakni menyediakan aneka informasi lowongan pekerjaan, Memberikan pelayanan konseling karier jaminan kehilangan pekerjaan dan lain-lain.

I. Angka Kemiskinan

Pada LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2021 dan 2022, Realisasi Angka Kemiskinan yang disajikan merupakan nilai dari Angka Kemiskinan sedangkan dalam formula yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan Persentase Penurunan Angka Kemiskinan. Dimana pada tahun 2022 angka kemiskinan Kota Palangka Raya sebesar 3,61 % dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.620 jiwa. Dan Pada tahun 2023, angka kemiskinan Kota Palangka Raya sebesar 3,44% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.310. Sehingga untuk persentase penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,71% dengan capaian 48,75%. Sedangkan untuk persentase penurunan angka kemiskinan (GAP) tahun 2021 dengan 2022 sebesar 3,73%.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2021 predikat Indeks RB masing pada posisi CC, namun nilainya mengalami penurunan yakni 50,08 yang disebabkan beberapa nilai pengungkit yang terbit dari beberapa Kementerian lainnya mendapatkan nilai yang rendah sehingga berpengaruh pada nilai tahun 2021. Pada Tahun 2022 Indeks RB mengalami peningkatan yang signifikan dengan predikat B dengan nilai 60,30. Peningkatan tersebut berkat Arahkan KemenpanRB melalui rekomendasi pada LHE RB tahun sebelumnya dan juga komitmen

pimpinan, perangkat daerah yang menjadi subjek penilaian dan pihak Inspektorat yang berkomitmen penuh dalam membantu dalam pemenuhan seluruh penilaian dalam PMPRB. Pada Tahun 2023 Indeks RB Kota Palangka Raya masih berada pada predikat B, namun demikian nilai yang diperoleh mengalami peningkatan menjadi 65,07. Dimana pada tahun 2023 terdapat perbedaan penilai yang Dimana pada awalnya penilaian melalui PMPRB dan untuk tahun 2023 dan kedepannya menggunakan Portal RB yang didalamnya terdapat RB General dan RB Tematik.

K. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP dari Tahun 2021 hingga 2023 memperoleh predikat B, namun nilai yang diperoleh masih mencukupi seperti pada tahun 2302 nilainya hanya 62,08. Didalam Lembar Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 memang masih banyak rekomendasi yang harus ditindak lanjuti dan Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen untuk dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh KemenpanRB hingga diharapkan pada tahun berikutnya nilai dan predikat AKIP Pemerintah Kota Palangka Raya mengalami peningkatan menjadi Kategori BB.

L. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada Tahun 2023 Penilaian Opini BPK untuk Kota Palangka Raya hingga saat LKIP ini disusun masih belum keluar penilaian Opini BPK. Namun dilihat dari Opini Tahun 2022 lalu, Pemerintah Kota Palangka Raya optimis bahwa penilaian tersebut akan memperoleh Opini WTP. Hal ini didasari dari capaian yang telah diperoleh Kota Palangka Raya selama **7 (tujuh) tahun** yakni dari tahun 2016 hingga 2022 telah memperoleh **WTP** secara berturut-turut.

M. IKM

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2021 hingga 2023 masih pada predikat Baik (B). Dan masih belum bisa mencapai predikat A. Banyak indikator yang menyebabkan masih belum terpenuhinya Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi sangat baik. Dari capaian IKM tersebut menggambarkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasa puas dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, sehingga kedepannya ini menjadi fokus dalam pemberian Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat seperti halnya kecepatan, transparansi, kemudahan serta banyak hal lainnya.

N. Angka Kriminalitas

*Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Kriminalitas** pada sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8) dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **“Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang tertangani”**.*

Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada saat ini memasuki tahun ketiga dengan arah kebijakan optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya untuk mewujudkan lingkungan cerdas. Maka berdasarkan hal tersebut Rencana Strategis dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut dengan cara membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah utamanya di bidang perijinan bangunan, dan perijinan-perijinan yang termasuk di dalamnya serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum lainnya.

Dibawah ini akan ditampilkan tabel kondisi realisasi dan capaian pelaksanaan tiga tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis K3:

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		Formula Capaian Indikator Tahun 2023
		R	C	R	C	R	C	R	C	
Persentase Pelanggaran K3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	(Jumlah Pelanggaran K3 yg ditangani/ Jumlah Kejadian Pelanggaran K3) x 100% (500/500) x 100%

O. Angka Konflik

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Konflik** dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut**.

Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut pada tahun 2023 berada pada peringkat 33 sedangkan target yang diharapkan berapa pada peringkat ke 15. Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 capain peringkat Nasional angka indeks toleransi juga masih belum mencapaia target karena masih berada pada peingkat 16 dan 17. Walaupun Kota Palangka Raya berada pada peringkat ke 33 dari 94 Kota yang dinilai, namun nilai indeks yang di peroleh Kota Palangka Raya sebesar 5,170 dimana range penilaian tersebut dari angka 1 (kualitas rendah) dan angka 7 (kualitas tertinggi). Yang mana menunjukkan bahwa Indeks Toleransi Kota Palangka Raya telah melebihi dari rata-rata angka Nasional sebesar 5,06.

P. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri

Dari tabel perbandingan target dan realisasi kinerja IKU Pemerintah Kota Palangka Raya antara tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capain dari tahun ketahun masih belum pernah mencapai target ataupun melebihi target. Hanya saja pada tahun 2021 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian melebihi target dengan realisasi 7,18 poin. Selebihnya pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, perdagangan dan industri masih belum mencapai target.

Q. Nilai Investasi

Pada tabel nilai investasi diatas didapati bahwa Persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif diperoleh dengan menghitung persentase dari pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Jumlah total investasi yang dibukukan oleh PMDN dan PMA di Kota Palangka Raya pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 344,76 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023 investasi penanaman modal yang dibukukan mencapai Rp 454,93 Milyar. Dengan demikian investasi penanaman modal pada tahun 2023 tumbuh sebesar Rp 110,49 Milyar dibandingkan dengan pada tahun 2022, atau tumbuh sebesar 13,2%.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

TABEL
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA IKU PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (M1S1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)	65	66,75
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	71,63	78,95
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU)	80%	80%
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI)	76%	76%
5.	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50	76,73
		Indeks Kualitas Air	70	46,92
		Indeks Kualitas Udara	75	86,97
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup	73,19	73,70
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah	11,10	14,99
		Rata-Rata Lama Sekolah	11,85	11,65
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,72	5,13
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Angka Kemiskinan (persentase menurunnya angka kemiskinan)	9,66%	4,71%
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Nilai SAKIP	B	B
		Opini BPK	WTP	Dalam Proses Penilaian
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM	A	B
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	Angka Kriminalitas / Persentase Pelanggaran K3 yang tertangani	5,55 / 100%	100% Indikator K3
		Angka Konflik / Peringkat nasional Indeks Toleransi	15	Peringkat 33

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI 2023
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4,04	1,49
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	8,69	6,48
		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,41	3,79
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi	350	454,9

A. Indeks Kualitas Infrastruktur Ke PU an

Perbandingan Indikator Indeks Kualitas Infrastruktur ke PU an (IKPU) dengan Target RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan capaian sebesar **66,75** dan jika dibandingkan dengan target sebesar 65 berarti capaian kinerja mencapai **102,69%**.

B. Indeks Kualitas Permukiman

Dalam perbandingan target RPJMD Kota Palangka Raya dengan indikator Indeks Kualitas permukiman mencapai kinerja sebesar **110,21%**. Hal ini membuktikan bahwa Indeks Kualitas Permukiman telah tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

C. Persentase Kecamatan yang Terlayani Transportasi Umum

Dari target akhir RPJMD pada indikator persentase kecamatan yang terlayani transportasi umum dengan capaian realisasi kinerjanya sebesar **80%** dari target sebesar **80%** juga dimana pencapaian telah berada pada posisi **100%** atau bisa di jabarkan bahwa target 4 kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya telah seluruhnya terlayani transportasi umum.

D. Persentase Wilayah (Kelurahan) yang Terkoneksi Jaringan Internet

Dari target RPJMD pada indikator persentase wilayah (Kelurahan) dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100% atau dengan kata lain, target dan realisasi telah tercapai sepenuhnya. Dari target akhir RPJMD 76% dan capaian realisasi juga 76% bisa dikatakan bahwa target telah tercapai. Namun masih ada beberapa kelurahan yang masih belum bisa terjangkau

koneksi internet dikarenakan wilayah kelurahan tersebut harus melalui jalur Sungai untuk bisa mencapai wilayah kelurahan tersebut.

E. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Kualitas Air dan Kualitas Udara

Pada target RPJMD yang telah ditetapkan untuk kualitas Tutupan Lahan telah mencapai kinerja sebesar 153,46% dengan kata lain melebihi target yang telah ditetapkan. Berbeda halnya dengan capaian kinerja Kualitas Air dimana capaian kinerjanya sebesar 67,03% dikarenakan kualitas air di Kota Palangka Raya mengalami peningkatan pencemaran air sungai yang disebabkan terjadinya penambangan liar di sepanjang sungai di Kota Palangka Raya. Untuk Kualitas Udara pada Tahun 2023 ini telah mencapai persentase sebesar 115,96% hal ini dikarenakan sedikitnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangka Raya.

F. Angka Harapan Hidup

Untuk indikator angka harapan hidup yang di targetkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya, pada tahun 2023 telah mencapai realisasi kinerjanya sebesar 100,70%. Dimana angka harapan hidup mencapai 73,70 tahun. Yang berarti usia hidup masyarakat di Kota Palangka Raya menyentuh umur 73,70 tahun.

G. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Pada target RPJMD yang telah ditetapkan untuk indikator harapan lama sekolah telah mencapai 135,05% dari realisasi 14,99 tahun. Dari angka tersebut menyatakan bahwa harapan lama sekolah anak usia Pendidikan telah mencapai hampir 15 tahun dalam mengenyam Pendidikan. Untuk target RPJMD pada indikator rata-rata lama sekolah telah mencapai 98,31% dari 11,65 tahun. Dari capaian tersebut menyatakan bahwa anak-anak usia sekolah yang mengenyam Pendidikan mencapai 11,65 tahun, atau sampai umur 18 dan 19 tahun.

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk Capaian Kinerja tahun 2023 berdasarkan target akhir RPJMD telah mencapai 111,50%. Perhitungan tingkat pengangguran terbuka ini menggunakan perhitungan terbalik dari persentase yang biasa. Dikarenakan capaian realisasi menurun berarti capaian yang diperoleh semakin meningkat. Dan tingkat pengangguran yang ada di Kota Palangka Raya mencapai 5,13 %.

I. Angka Kemiskinan

Pada perbandingan Indikator angka kemiskinan dengan target akhir RPJMD dengan tahun 2023 dicapai sebesar 4,71 % dimana nilai tersebut merupakan persentase menurunnya angka kemiskinan dengan tahun sebelumnya atau selisih (GAP). Dimana capaian realisasinya sebesar 48,75%.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan target RPJMD yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan predikat B, Kota Palangka Raya telah memperoleh predikat B. Dimana nilai yang diperoleh pada Tahun 2023 sebesar 65,07 poin. Dimana target Pemerintah Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 ditetapkan dengan predikat BB (70,00).

K. Nilai SAKIP

Pada Tahun 2023 target Nilai SAKIP yang ditetapkan dalam RPJMD yakni predikat B dengan realisasi yang diperoleh yakni predikat B (62,08). Kedepannya diharapkan Nilai SAKIP Kota Palangka Raya dapat menembus angka 70,00 atau predikat BB dimana seluruh Perangkat Daerah dan pimpinan Daerah harus berkomitmen penuh dalam peningkatan kualitas SAKIP di Kota Palangka Raya dan dengan menindak lanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan melalui LHE dari Kemenpan RB.

L. Opini BPK

Untuk perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian realisasi Opini BPK pada tahun 2023 ini masih belum bisa dibandingkan dikarenakan untuk penilaian Opini BPK masih belum realisasi dari BPK. Namun Pemerintah Kota Palangka Raya merasa optimis untuk pencapaian di tahun 2023, Kota Palangka Raya masih memperoleh predikat WTP.

M. IKM

Untuk perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian realisasi IKM pada tahun 2023 ini memang masih belum mencapai target akhir RPJMD. Dimana untuk capaian tahun 2023 hanya mencapai kategori B dimana target akhir RPJMD adalah A.

N. Angka Kriminalitas

*Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Kriminalitas** pada sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8) dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk tindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **“Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang tertangani”**.*

Pada perbandingan target akhir RPJMD, perbandingan indikator angka kriminalitas dapat dibandingkan dengan rancangan perencanaan jangka menengah berdasarkan publikasi dari Kepolisian Kota Palangka Raya dengan capaian perbandingan rencana jangka menengah menunjukkan hasil yang positif namun pada evaluasi AKIP Tahun 2022 Kementerian PAN-RB

memberikan masukan untuk mengganti indikator tersebut menjadi persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang tertangani dalam hal penyelesaian pelanggaran K3. Pergantian indikator ini pun tertuang pada rencana rancangan pembangunan Kota Palangka Raya dimana dalam laporan penanganan pelanggaran K3 selalu mendapat nilai 100%.

O. Angka Konflik

*Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1153/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022, bahwa pada Saat dilaksanakan evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, bahwa indikator **Angka Konflik** dinilai kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Palangka Raya dan disarankan untuk ditinjau kembali, sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi **Peringkat Nasional angka Indeks Toleransi yang di Keluarkan oleh SETARA Institut**.*

Pada perbandingan target akhir PRJMD, Perbandingan Angka konflik berubah menjadi Peringkat Nasional Indeks Toleransi sesuai dengan arahan dan masukan yang diberikan. Dimana pada masa akhir RPJMD memiliki target 15 dengan realisasi peringkat 33 hal ini dikarenakan SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi, mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial.

P. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri

Untuk perbandingan capaian tahun 2023 dengan Target akhir RPJMD pada pertumbuhan sektor PDRB Pertanian masih belum mencapai target yang mana capaiannya hanya sebesar 1,49 persen dari target akhir RPJMD sebesar 4,04. Hal ini juga terjadi pada Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dimana masih belum mencapai atau belum melebihi target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 6,48 persen. Untuk Pertumbuhan PDRB sektor Industri juga masih belum mencapai perbandingan target Akhir RPJMD yang hanya mencapai sebesar 3,79 % saja.

Q. Nilai Investasi

Dari target akhir RPJMD dari indikator Nilai Investasi yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia, nilai investasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 454,93 Milyar atau mencapai 129,97% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa geliat investasi di Kota Palangka Raya sangat menjanjikan dan mulai bertumbuh kearah yang lebih meningkat.

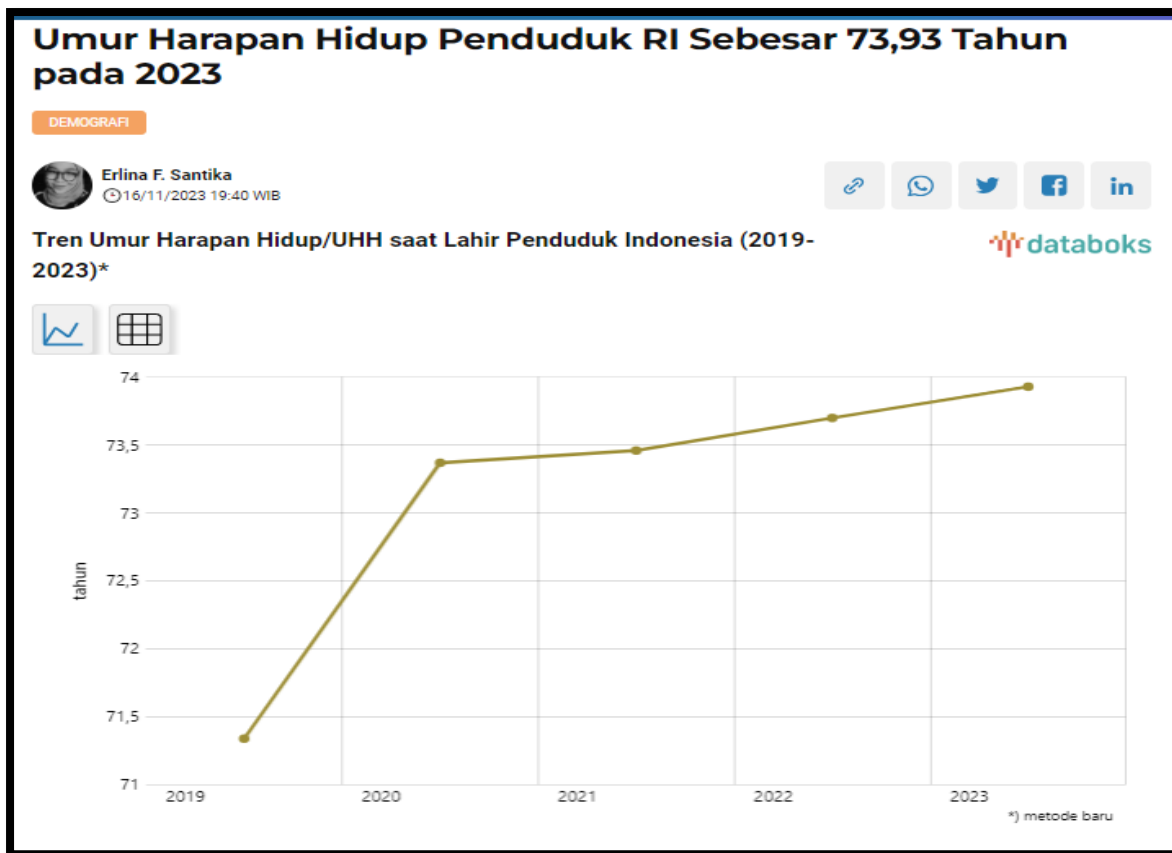
4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

A. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan Nasional tahun 2023 sebesar 61,79 poin dan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palangka Raya tahun 2023 sebesar 76,73 poin. Hal ini berarti untuk capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang telah dicapai Kota Palangka Raya lebih tinggi dari capaian Nasional. Indeks Kualitas Air Nasional tahun 2023 sebesar 54,59 poin dan untuk capaian Indeks Kualitas Air Kota Palangka Raya tahun 2023 sebesar 46,92 poin. Dimana capaian Kota Palangka Raya lebih rendah dari capaian Nasional, hal ini menggambarkan bahwa di Kota Palangka Raya masih tingginya pencemaran air khususnya pencemaran air sungai. Indeks Kualitas Udara Nasional tahun 2023 sebesar 88,67 poin dan untuk capaian Indeks Kualitas Udara Kota Palangka Raya sebesar 86,97 poin. Dimana capaian Kota Palangka Raya lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 1,70 poin. Salah satu penyebab masih belum melebihi capaian Nasional pada Indeks Kualitas Udara yaitu sempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berselang dalam kurun waktu antara 1 sampai 2 bulan di tahun 2023.

Aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya merupakan salah satu titik vital yang esensial bagi banyaknya aktivitas masyarakat seperti kegiatan pertambangan emas (PETI) oleh masyarakat lokal, kegiatan MCK (mandi, cuci dan kakus) yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran bantaran sungai Kahayan, kegiatan jalur transportasi antar daerah ataupun usaha perdagangan, dan juga berbagai aktivitas usaha seperti pemeliharaan ikan keramba, laundry, rumah makan dan lain sebagainya. Perkembangan pemukiman di tepian sungai Kahayan Kota Palangka Raya mengalami peningkatan tiap tahun.

B. Angka Harapan Hidup



Pada tahun 2023 umur atau angka harapan hidup nasional mencapai poin 73,93 Tahun dan capaian Kota Palangka Raya untuk angka harapan hidup sebesar 73,70 Tahun atau selisih antara capaian nasional dengan capaian Kota Palangka Raya sebesar 0,23 Tahun.

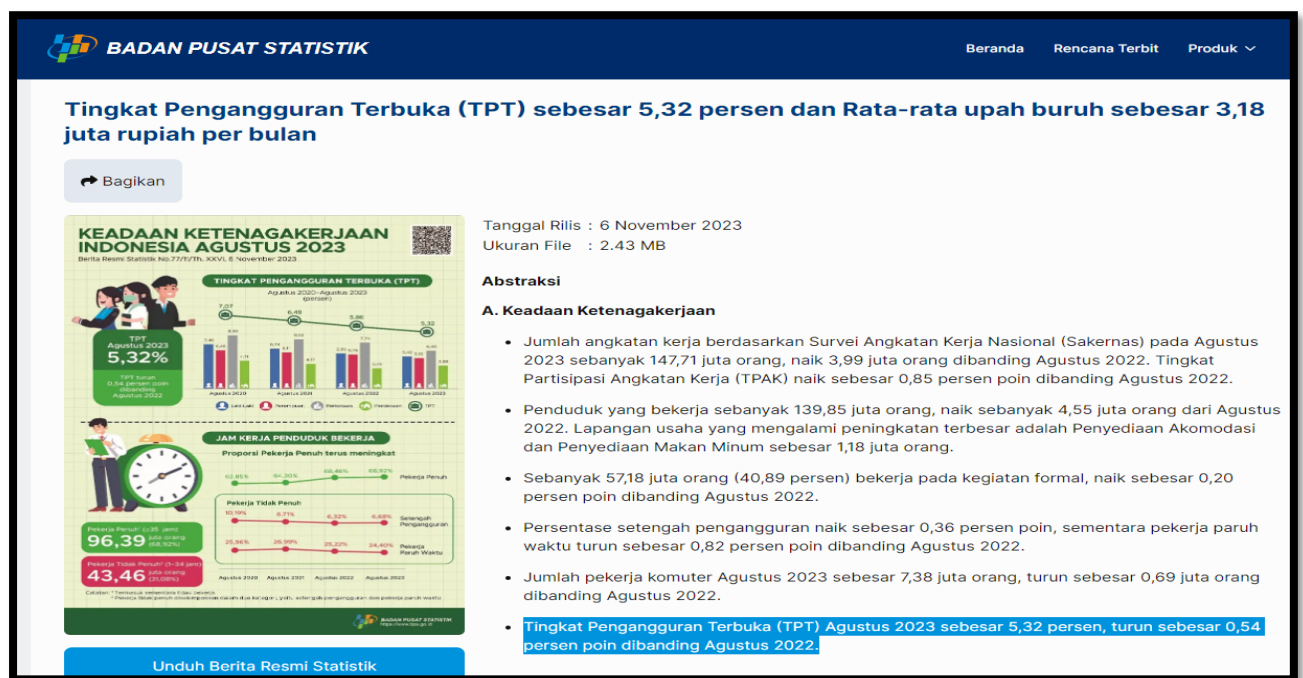
C. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Indonesia tercatat mencapai 13,15 tahun pada 2023. Ini artinya, anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan setidaknya hingga diploma I. Untuk Kota Palangka Raya, Harapan lama sekolah telah mencapai 14,99 tahun dan hampir mencapai 15 tahun. Ini artinya anak-anak di Kota Palangka Raya memiliki harapan menempuh pendidikan setidaknya hingga diploma III. Dan capaian Harapan lama sekolah di Kota Palangka Raya lebih tinggi capaiannya dari capaian Nasional dengan selisih 1,84 tahun.

D. Rata-Rata Lama Sekolah

Pada tahun 2023 nilai rata-rata lama sekolah tingkat Nasional mencapai 8,77 tahun dengan demikian, rata-rata penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX atau tingkatan SLTP. Sedangkan di Kota Palangka Raya telah melampaui angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah dan angka rata-rata lama sekolah Nasional sebesar 11,65 tahun. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan program pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam seluruh Satuan Pendidikan di Kota Palangka Raya.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka tingkat Nasional per Agustus 2023 sebesar 5,32 persen sedangkan untuk tingkat Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar 5,13 persen. Dengan kata lain bahwa untuk Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah di capai Kota Palangka Raya melebihi dari pencapaian Nasional.

F. Angka Kemiskinan



Angka kemiskinan Nasional per Maret 2023 sebesar 9,36% dan untuk Angka Kemiskinan di Kota Palangka Raya sebesar 3,44 persen. Dari angka tersebut menyatakan bahwa di Kota Palangka Raya, masyarakat miskin masih tergolong sangat kecil di dibandingkan dengan tingkat Nasional dengan selisih sekitar 5,92 persen.

G. Nilai Investasi



Capaian realisasi investasi secara tingkat Nasional 2023 sebesar Rp. 1.418,9 triliun atau melampaui target (101,3 persen) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 1.400 triliun. Dimana apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Kota Palangka Raya sebesar Rp. 454,9 Miliar. Kalaupun dilihat perbandingan dengan Nasional, capaian realisasi Investasi jauh dari tingkat Nasional. Namun apabila dibandingkan capaian realisasi Investasi yang dicapai sudah sebesar 129,97% dari target yang telah ditetapkan.

5. ANALISIS PENYEBAB DARI KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

A. Indeks Kualitas Infrastruktur Ke PU an

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya infrastruktur jalan, drainase dan irigasi sesuai tata ruang dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang capaian target yaitu:

- a. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap telah melampaui target hingga akhir periode RPJMD yaitu sebesar sebesar 101,85%, hal ini karena ditunjang pendanaan yang cukup signifikan dan terdapat tambahan anggaran yang bersumber dari Dana PEN tahun 2022 yang peruntukannya khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase.
- b. Persentase panjang kanal banjir dalam kondisi baik pada tahun 2023 atau hingga akhir periode RPJMD mencapai 98,40% dari target yang telah ditetapkan, hal karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut dan pada tahun 2023 pekerjaan yang dilakukan hanya untuk mempertahankan kondisi yang telah ada.
- c. Persentase luas lahan pertanian terlayani irigasi kondisi baik pada tahun 2023 atau hingga akhir periode RPJMD hanya mencapai 81,69% dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan seperti halnya untuk indikator persentase panjang kanal banjir yaitu terbatasnya anggaran yang tersedia. Pada tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya memperoleh anggaran yang bersumber dari OAK Bidang Irigasi untuk mendukung pencapaian indikator dimaksud, tetapi beberapa tahun terakhir dinas tidak mendapatkan dana OAK bidang irigasi lagi.
- d. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik telah pada tahun 2023 atau hingga tahun terakhir RPJMD telah melampaui target yaitu dengan capaian sebesar 100,41 %. Pencapaian ini pun seperti halnya untuk indikator Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap ditunjang

pendanaan yang cukup signifikan salah satunya berasal dari Dana PEN tahun 2022 yang peruntukannya khusus untuk perbaikan infrastruktur jalan dan drainase.

- e. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR pada tahun 2023 atau hingga akhir periode RPJMD mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Palangka Raya cukup baik. Ini menunjukkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik semua stakeholder terkait dengan indikator dimaksud.
- f. Persentase Bangunan Laik Fungsi pada tahun 2023 atau hingga akhir periode RPJMD tercapai sebesar 100,0% dari target yang ditetapkan. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dari aparaturnya pelaksana serta meningkatnya kesadaran dan pemahaman setiap pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi di Kota Palangka Raya.
- g. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 atau hingga akhir periode RPJMD tercapai sebesar 92,10% dari target yang ditetapkan. Masih belum tercapainya indikator diatas dipengaruhi berbagai faktor salah satunya yang paling berpengaruh adalah pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya.
- h. Persentase rumah tangga memiliki akses air limbah domestik layak hingga tahun 2023 atau akhir periode RPJMD tercapai sebesar 110,60%. Ini menunjukkan peningkatan kinerja aparaturnya pelaksana pada dinas serta dukungan anggaran yang konsisten selama periode lima tahun terakhir

B. Indeks Kualitas Permukiman

Untuk mencapai sasaran Strategis meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dalam indikator kinerja utama (IKU) tahun 2023 ada beberapa penyebab tidak teralisasinya capaian kinerja utama atau peningkatan capaian realisasinya sebagai berikut :

- a. Persentase rumah layak huni dikawasan permukiman kumuh teralisasi cukup baik dengan realiasi 57,25% dengan target awal 88,87%, realisasi tidak maksimal hal ini disebabkan karena luasan permukiman kumuh tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 214,13 Ha, hal ini berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh tingkat Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Tahun 2017 luasan kawasan kumuh hanya 105,13 Ha. Tahun 2021 terbitnya Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/89/2021 luasan kawasan kumuh Kota Palangka Menjadi 235,49 Ha, di karena terlalu besar luasan kawasan kumuh terbut, maka dilakukan penghitungan ulang luasan kawasan kumuh Kota Palangka Raya, sehingga berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Tingkat Kota Palangka Raya, tanggal 22 Desember 2022 antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya dengan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya sehingga luasan kawasan kumuh ditetapkan menjadi 214,13 Ha, Target kawasan kumuh tahun 2022 seluas 25,11 Ha dan Sisa kawasan kumuh seluas 189,02 Ha.

Jumlah Capaian Tahun 2021 jumlah unit rumah layak huni yang dilaksanakan di permukiman kumuh berjumlah 127 unit rumah dengan luasan sebesar 93,49 ha. Jumlah capaian Tahun 2022 jumlah unit rumah layak huni yang rehabilitasi berjumlah 143 Unit rumah dengan luasan 29,11 Ha. Jumlah Capaian Tahun 2023 jumlah unit rumah tidak layak huni yang direhabilitasi berjumlah 134 dengan luasai 9,61 Ha .

- b. Persentase peningkatan rumah layak huni dikawasan kumuh terealisasi sangat baik dengan capaian 28,91% dengan target 8,057%, hal ini disebabkan peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni meningkat 100% dengan jumlah 422 Unit rumah yang direhabilitasi, yang berada di kecamatan bukit batu, kecamatan pahandut, kecamatan sebangau dan kecamatan jekan raya yang dianggarkan pada Dana APBD Tahun 2023, Dana BPS Tahun 2023, APBD Provinsi Tahun

2023 dan Dana Baznas Tahun 2023. Total jumlah rumah layak huni adalah 860 unit rumah ditambah dengan rumah layak huni yang tertangani tahun 2021 sebesar 127, tahun 2022 143 unit dan Tahun 2023 berjumlah 422 Unit rumah dengan total 1.552 unit rumah.

- c. Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik teralisasi dengan sangat baik capaian 109% dengan target 74,51%. Hal ini disebabkan pembangunan jalan lingkungan terlaksana sesuai dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dilapangan ,tepat waktu sehingga panjang jalan lingkungan kondisi baik bertambah/meningkat menjadi 37.013 Km tahun 2021, tahun 2022 panjang jalan 37.018 Km dan Tahun 2023 Panjang jalan 37,022 Km, dengan panjang jalan lingkungan di kota palangka raya sepanjang 122.420 Km. Target capaian RPJMD sampai tahun 2023 sebesar 74,51%. .
- d. Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik terealisasi sangat baik capaian tahun 2023 sebesar 5,12%, Tahun 2022 sebesar 4,82% , Tahun 2020 sebesar 10,95% dan Tahun 2021 capaian sebesar 4,58% jadi total akumulasi sampai tahun 2023, Persentase Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik sebesar 25,47%. Hal ini disebabkan panjang salurah drainase bertambah menjadi 20.438 Km tahun 2021, tahun 2022 menjadi 21.514 Km, Tahun 2023 menjadi 24.228.

C. Persentase Kecamatan yang Terlayani Transportasi Umum

Faktor penyebab keberhasilan capaian kecamatan yang terlayani transportasi umum dan survei indeks kepuasan Masyarakat antara lain :

1. Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara independen, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara mandiri dan mengundang seluruh awak media cetak, elektronik dan online dalam rangka menginformasikan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya akan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023

c. Gatur Dan Pengawasan Gratis



d. RampCheck



e. Antar Jemput Masyarakat Yang Divaksin Secara Gratis



D. Persentase Wilayah (Kelurahan) yang Terkoneksi Jaringan Internet

Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya adalah Pengembangan E-Government menuju kota cerdas memiliki beberapa indikator sebagai tolak ukur adalah sebagai berikut :

Persentase Wilayah Kelurahan yang terkoneksi Jaringan Internet

Persentase Tingkat Capaian : 100 %, dengan kriteria penilaian (“Sangat Baik”).

- Pencapaian Indikator pada Tahun 2023 dari RPJMD dan Renstra adalah 23 (Dua Puluh Tiga) Kelurahan dari 30 Kelurahan yang ada atau sebesar 76 %, dan dari Target 76 %
- Pencapaian Indikator Pada Tahun 2022 dari RPJMD dan Renstra adalah 22 (Dua Puluh Dua) Kelurahan dari 30 Kelurahan atau sebesar 73% dengan Dihat dari pencapaian Tahun 2022 ke Tahun 2023 dengan peningkatan capaian sebesar 10 %

DATA WILAYAH KELURAHAN YANG TERKONEKSI JARINGAN INTERNET

No.	Kecamatan	No	Kelurahan
1.	Pahandut	1.	Pahandut
		2.	Panarung
		3.	Langkai
		4.	Tumbang Rungan
		5.	Tanjung Pinang
		6.	Pahandut Seberang
2.	Jekan Raya	7.	Menteng
		8.	Palangka
		9.	Bukit Tunggal
		10.	Petuk Katimpun
3.	Sabangau	11.	Kereng Bangkirai
		12.	Sabaru
		13.	Kalampangan
		14.	Bereng Bengkel
		15.	Kameloh Baru
4.	Bukit Batu	16.	Marang
		17.	Tumbang Tahai

		18.	Banturung
		19.	Tangkiling
		20.	Sei Gohong
5.	Rakumpit	21.	Pager
		22.	Petuk Bukit
		23.	Mungku Baru
Jumlah Kelurahan yang terkoneksi jaringan internet		23 Kelurahan	76 %
Jumlah Seluruh Kelurahan		30 Kelurahan	

Permasalahan yang dihadapi

1. Infrastruktur Jaringan yang masih belum memadai
2. Sarana dan Prasarana pendukung pengembang TIK masih terbatas

Solusi /Alternatif yang dilakukan

Mengurangi jumlah Blank Spot Area khususnya sebagian di Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Sabangau dan Kecamatan Bukit Batu melalui program Kerjasama dengan BAKTI (Badan Akselerasi Telekomunikasi dan Informasi) dengan pembangunan Menara BTS di Kantor Kecamatan Rakumpit.

E. Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

Penyebab Menurunnya Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sedikit mengalami penurunan pada **Indek Kualitas Air (IKA)**, ini dikarenakan Masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggir sungai sehinggameningkatkan pencemaran sungai, dan Musim panas/kemarau yang cukup panjang sehingga mengakibatkan beberapa titik pemantauan memiliki debit kecil. Untuk Indeks Kualitas Udara (IKA) didukung Aspek bencana kebakaran hutan yang menurun dan pendeknya musim kemarau sangat

membantu meningkatkan Indeks Kualitas Udara. Jumlah sumber pencemar udara lainnya seperti cerobong asap pabrik dan asap dari kendaraan bermotor juga masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan Ibu Kota Provinsi / Kota Besar lainnya, sehingga sangat mempengaruhi Indeks Kualitas Udara di Kota Palangka Raya. Penyebab terjadi penurunan indeks air tersebut salah satunya bencana banjir yang melanda Kota Palangka Raya di sebabkan air tersebut tercampur dengan tanah liat menjadi air sungai yang sangat keruh dan kotor. Semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan masyarakat, terutama dalam hal kualitas air pasti akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang kita terima adalah terjadinya pencemaran air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan maka dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Aliran sungai Kahayan di Kota Palangka Raya merupakan salah satu titik vital yang esensial bagi banyaknya aktivitas masyarakat seperti kegiatan pertambangan emas (PETI) oleh masyarakat lokal, kegiatan MCK (mandi, cuci dan kakus) yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran bantaran sungai Kahayan, kegiatan jalur transportasi antar daerah ataupun usaha perdagangan, dan juga berbagai aktivitas usaha seperti pemeliharaan ikan keramba, laundry, rumah makan dan lain sebagainya. Perkembangan pemukiman di tepian sungai Kahayan Kota Palangka Raya mengalami peningkatan tiap tahun. Peningkatan penduduk di bantaran sungai Kahayan ini menjadi salah satu faktor yang berpotensi mencemari lingkungan air Sungai Kahayan dimana dari kegiatan-kegiatan tersebut akan meningkatkan jumlah sampah hingga limbah yang dapat langsung di buang ke aliran sungai Kahayan.

Solusi yang bisa dilakukan antara lain :

Melakukan relokasi masyarakat yang hidup di aliran sungai agar bisa berpindah tempat tinggal di daratan. Kemudian melakukan sosialisasi agar tidak membuang sampah di sungai yang dapat menyebabkan tercemarnya kualitas air di Sungai Kahayan.

F. Angka Harapan Hidup

Beberapa penyebab keberhasilan dan kegagalan di bidang kesehatan antara lain :

1) Pendorong Keberhasilan

- a. Jumlah tenaga kesehatan dengan rasio per-100.000 penduduk, serta jumlah sarana pelayanan kesehatan dengan rasio per-100.000 penduduk, sehingga jangkauan pelayanan dapat terpenuhi dengan layanan di dalam dan luar gedung puskesmas.
- b. Sistem Surveillance penyakit menular dilaksanakan secara terpadu dengan sistem surveillance untuk program kesehatan yang lain (gizi buruk, masalah kesehatan pada saat/pasca bencana, KLB, dan lain-lain)
- c. Program Kesehatan mendapatkan perhatian baik secara vertikal (dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah) dan horizontal dari lintas sektoral. Sehingga bimbingan teknis serta supervisi dari kementerian kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah melalui buku pedoman dan pertemuan sosialisasi, koordinasi serta evaluasi program kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan secara rutin dilaksanakan.
- d. Alokasi anggaran APBN melalui DAK Fisik Tahun 2023, membantu dalam memenuhi kebutuhan akan prasarana dan alat kesehatan untuk puskesmas dan RSUD, dimana anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Sedangkan DAK Non-Fisik Tahun 2023 dapat mendukung pencapaian program UKM di puskesmas.
- e. Sinergitas program/kegiatan baik antara kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah serta dengan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

2) Penyebab Kegagalan

- a. Tugas rangkap paramedis di puskesmas, selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga bertanggungjawab melakukan

pencatatan akuntansi/akrual keuangan dan asset (bendahara di puskesmas).

- b. Kesadaran masyarakat akan hidup bersih belum optimal, sehingga berperan sebagai penyumbang berkembangnya penyakit menular yang terkait sanitasi lingkungan (DBD, Diare, Tifus, Demam Tifoid, TB Paru, dll), serta penyakit menular langsung (COVID-19).
- c. Pola hidup sehat juga belum diimplementasikan oleh masyarakat, sehingga bisa berperan pada meningkatnya kasus penyakit degeneratif (Obesitas, Hipertensi, Diabetes Melitus, Jantung, dll).
- d. Distribusi dan penyebaran tenaga kesehatan belum proportional antara daerah perkotaan, pedesaan, serta daerah aliran sungai.

Dengan adanya permasalahan yang dapat menjadi penyebab masalah, maka upaya yang perlu ditempuh dalam rangka memecahkan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Memperkuat Tim Advokasi untuk melakukan advokasi kepada *stake holder* dalam peningkatan pembiayaan kesehatan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan pentingnya 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).
- c. Meningkatkan Sosialisasi Program-Program Bidang Kesehatan yang berdampak langsung terhadap indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, seperti Sosialisasi P4K, Sosialisasi Buku KIA, Sosialisasi Pelayanan MTBM, Sosialisasi MTBS, Sosialisasi dan orientasi SDIDTK, Orientasi dan sosialisasi tentang SHK, Mengadakan Audit Perinatal, Sosialisasi tentang IMD, Sosialisasi tentang ASI Eksklusif, Sosialisasi pelayanan kesehatan Reproduksi bagi Remaja.
- d. Mengusulkan penerimaan pegawai sesuai kompetensi yang diperlukan kepada pihak yang terkait, dan memberi dorongan serta kesempatan kepada tenaga medis dan paramedis yang ada untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.

- e. Penguatan Kapasitas Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) puskesmas yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader di masyarakat, Bidan dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani, yaitu Puskesmas Pahandut, Puskesmas Kereng Bangkirai dan Puskesmas Tangkiling serta Peningkatan kualitas home care.

G. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Penyebab kegagalan rata-rata lama sekolah di Kota Palangka Raya disebabkan banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Berdasarkan survei yang dilakukan, penduduk di atas usia 25 tahun juga banyak yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ini disebabkan banyaknya masyarakat di masa lampau yang tidak melanjutkan sekolah, bahkan banyak ditemukan yang tidak pernah sekolah. hal tersebut menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang rata-rata lama sekolah salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberi kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun tersebut, untuk mengambil paket A, B dan C. Selain terus mengupayakan berbagai cara baik dengan mengajarkan pendidikan dasar seperti membaca dan menulis.

Solusi yang bisa diberikan antara lain :

Memberi bantuan kepada anak usia pendidikan yang tidak melaksanakan pendidikan melalui dana APBD maupun dari dana APBN. Melaksanakan Kelompok Belajar Paket A,B dan C bagi masyarakat yang putus sekolah agar dapat mengenyam pendidikan yang ada.

H. Tingkat Pengangguran Terbuka

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisa Faktor Penghambat/keberhasilan	Alternatif Solusi untuk Perbaikan
Tingkat pengangguran terbuka Diukur pada awal tahun berikutnya (2024), sesuai publikasi BPS Kota Palangka Raya	selalu memonitoring data yang diupdate oleh BPS
Belum dapat diperhitungkan persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi karena menunggu hasil uji kompetensi peserta pelatihan PBK	Berkoordinasi /Bersurat ke BBPVP Bekasi Selaku Balai Pembina terkait dengan hasil uji Kompetensi Peserta PBK
1. Alat pelatihan yang tidak update 2. Butuhnya peningkatan kemampuan instruktur	1. Perlu adanya penganggaran untuk pengadaan alat pelatihan 2. Melakukan permohonan dan penganggaran untuk mengikuti Uji Kompetensi untuk Instruktur
Keterbatasannya dana sehingga hanya sedikit perusahaan kecil yang dapat dibina dalam konsultasi peningkatan produktivitas	Memaksimalkan peningkatan produktivitas perusahaan kecil yang dapat dibina
Adanya perbedaan selera pasar kerja antara lowongan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja dengan pekerjaan yang diinginkan oleh pencari kerja sehingga tidak terjadi proses penempatan.	Meningkatkan jumlah pemberi kerja yang melaporkan lowongan kerja guna Mengoptimalkan penyediaan informasi lowongan pekerjaan dengan berbagai jenis varian jabatan
Kesulitan menyesuaikan/menetapkan jadwal dengan pihak sekolah	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak sekolah
Adanya perbedaan selera pasar kerja antara lowongan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja dengan pekerjaan yang diinginkan oleh pencari kerja sehingga tidak terjadi proses penempatan.	Meningkatkan jumlah pemberi kerja yang melaporkan lowongan kerja guna Mengoptimalkan penyediaan informasi lowongan pekerjaan dengan berbagai jenis varian jabatan

Analisa Faktor Penghambat/keberhasilan	Alternatif Solusi untuk Perbaikan
Minimnya kesadaran pencari kerja untuk melakukan pendaftaran pencari kerja pada karirhub.kemnaker.go. id. Sedangkan untuk pemberi kerja umumnya tidak mengetahui tata cara akses penggunaan fitur situs aplikasi karirhub	Untuk Pencari kerja akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan pendaftaran pencari kerja. Untuk Pemberi kerja perlu diberikan Bimbingan Teknis Tata Cara Akses Karirhub
Saat melakukan monev ke perusahaan terdapat perusahaan yang belum membuat syarat kerja (PP, PKWT, LKS Bipartit)	Melaporkan hasil monitoring kepada pengawas ketenagakerjaan provinsi agar dapat ditindaklanjuti
Capaian kinerja akan menghasilkan 100% karena dalam pengukuran indikator Jumlah PP yang disahkan dibagi Jumlah PP yang bermohon untuk disahkan	Melakukan reviu dalam penetapan target agar dapat diubah pada rencana perubahan 2023

(Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, 2023)

I. Angka Kemiskinan

Penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kota Palangka Raya disebabkan karena kemiskinan finansial, kesehatan, dan pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan yang buruk dan peningkatan anggaran yang buruk. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran secara berpengaruh besar terhadap angka kemiskinan. Kemungkinan karena belum meratanya pemerataan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terkait dengan penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga berdampak positif terhadap kemiskinan daerah.

Beberapa faktor penurunan ketercapaian kinerja, antara lain:

- 1) Pola dan gaya hidup yang serba instan serta mementingkan kesenangan sesaat (hedonisme) mendorong semakin tumbuh suburnya berbagai penyakit yang bersifat kronis, perilaku menyimpang, ketunasusilaan, kriminalitas, dan sebagainya.
- 2) Terdapat banyaknya masalah sosial menyebabkan kompleksnya data yang diperlukan. Seringkali terjadi perbedaan data dalam melakukan perencanaan dan pelayanan pada PPKS. Ada banyak faktor yang menyebabkan data PPKS berbeda antara hasil pendataan dengan keadaan sebenarnya misalnya karena pemahaman keluarga dan masyarakat menganggap bahwa PPKS adalah aib. Faktanya adalah mereka ada menjadi bagian dari masyarakat dan upaya yang perlu dilakukan adalah merubah status mereka sebagai PPKS menjadi manusia-manusia yang produktif dan mandiri sesuai dengan

Solusi yang bisa dilakukan antara lain :

Pemerintah perlu memperhatikan pengeluaran untuk bidang-bidang yang mempengaruhi pembangunan manusia, terutama pendidikan dan kesehatan. Serta upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui penciptaan industri padat karya baru dan pengembangan sektor informal.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Palangka Raya antara lain :

Keberhasilan :

1. Kota Palangka Raya telah melakukan penginputan dan penilaian RB General dan RB Tematik dimana nilai RB Kota Palangka Raya naik 5 poin pada tahun 2023;
2. Beberapa nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga dan Kementerian terkait mengenai nilai dan indeks penilaian juga telah diperoleh walaupun tidak seluruh penilaian memperoleh nilai yang tinggi;

3. Dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi melalui Portal RB, Inspektorat Kota Palangka Raya sangat berperan besar dalam mengevaluasi, maupun memberi saran dan masukan dalam pencapaian nilai yang didapat.

Kendala :

1. Ada beberapa poin dalam penilaian RB General yang masih belum mendapatkan penilaian, hal ini dikarenakan tidak adanya data dari penilaian tersebut;
2. Dikarenakan menggunakan Aplikasi dan sistem penilaian yang digunakan masih baru, sehingga masih diperlukan waktu untuk beradaptasi terhadap penilaian tersebut.

K. Nilai SAKIP

Keberhasilan dan peningkatan Nilai SAKIP Kota Palangka Raya pada Tahun 2023 antara lain:

- a) Melakukan perubahan perencanaan yang lebih berorientasi hasil dan berkualitas dari tahun sebelumnya;
- b) melakukan penjabaran kinerja yang selaras melalui perjanjian kinerja dari kepala daerah, kepala perangkat daerah hingga seluruh pegawai yang ada walaupun belum selesai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
- c) Melakukan pendampingan dan fasilitas internal kepada perangkat daerah dalam rangka penyusunan laporan kinerja;
- d) melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada seluruh perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Keberhasilan pencapaian peningkatan Nilai SAKIP dikategorikan berdasarkan Komponen penilaiannya yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah (PD). Kemudian, telah disusun *cascading* di level pemerintah daerah dan PD sebagai bentuk penjabaran kinerja dari perencanaan kinerja periode terbaru. Dalam dokumen perencanaan kinerja periode 2021-2026, beberapa PD telah merumuskan perencanaan kinerja yang berkualitas baik dan berorientasi pada hasil.

2. Pengukuran kinerja

Pemerintah Kota Palangka Raya dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala dalam periode triwulan atas pencapaian kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah disusun. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat pemerintah daerah dan PD.

3. Pelaporan kinerja

Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang sudah terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 untuk tingkat pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja untuk tingkat PD. Laporan kinerja tersebut telah mengikuti format dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Inspektorat Kota Palangka Raya telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di PD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kemudian, telah mendorong PD untuk menyusun laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

L. Opini BPK

Faktor Pendukung Keberhasilan Opini BPK :

1. Telah melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi dari BPK;
2. Telah sesuai dengan indikator penentuan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
3. Telah memberikan informasi dalam laporan keuangan yang jelas dan detail;
4. Adanya sistem pengendalian internal dari Inspektorat sebagai pengawas internal Kota Palangka Raya;
5. Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

M. IKM

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah :

1. Adanya komitmen Walikota Palangka Raya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan telah diresmikannya Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya pada 31 Oktober 2023.
2. Tingginya partisipasi Unit Pelayanan Publik untuk terus meningkatkan dan menyelenggarakan pelayanan publik yang prima di instasinya masing-masing.
3. Unit Pelayanan Publik yang telah berinovasi dalam penyelenggaraan publik secara online, seperti pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggunakan sistem online dalam pengurusan perijinan melalui SIMYANDU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggunakan antrean/kepengurusan administrasi secara online melalui aplikasi SI-DOI.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berkontribusi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dengan sinergisitas *stakeholder* antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kelurahan dalam

rangka validasi data calon peserta Jaminan Kesehatan Daerah secara elektronik (*Google Form*).

5. Telah adanya pengaduan melalui media online SP4N-LAPOR melalui SMS 1708 atau website www.lapor.go.id., dan media sosial yang segera ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh penyelenggara pelayanan.

Kendala Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah :

1. Terdapat Unit Pelayanan Publik yang belum menyusun kelengkapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan rinci (unsur kegiatan, unsur pelaksana dan unsur mutu baku berkaitan dengan persyaratan, waktu penyelesaian dan output).
2. Terdapat beberapa PD/UPP yang belum menyusun kelengkapan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan rinci, beberapa Unit Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya masih belum memutakhirkan dan memiliki SOP.
3. Terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang telah di susun masih belum mampu mempercepat waktu pelayanan.
4. Belum adanya bimbingan teknis bagi Unit Pelayanan Publik diluar Perangkat Daerah/Dinas dalam menyusun SOP dan Standar Pelayanan.
5. Terdapat beberapa Unit Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya yang belum memberikan fasilitas kemudahan informasi syarat pelayanan baik melalui brosur/leaflet/banner/maupun rincian informasi secara online.
6. Masih adanya sarana dan prasana yang tidak terawat, misalnya ditemukan beberapa toilet masih kurang bersih, di ruang tunggu tidak memiliki ruang laktasi dan ruang bermain anak.
7. Belum semua petugas penyelenggara pelayanan di Kota Palangka Raya telah mengikuti pelatihan service excellent.

N. Angka Kriminalitas

Secara umum, capaian kinerja yang telah dicapai sudah termasuk dalam katagori berhasil karena Persentasi Pelanggaran K3 yang tertangani di Kota

Palangka Raya mengalami pencapaian 100% berdasarkan RPJMD yang mana pada tahun 2023 angka Pelanggaran K3 yang tertangani adalah 500 pelanggaran.

Faktor penyebab keberhasilan penanganan Pelanggaran K3 yang tertangani salah satu penyebabnya yakni adanya penambahan SDM sebagai salah satu pendorong dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Penanganan Pelanggaran K3.

Adapun alternatif serta solusi yang dilakukan dalam pencapaian Kinerja pada Tahun 2023 adalah dengan terus memberikan semangat kepada anggota serta menanamkan nilai Nasionalisme dan Integritas agar dapat bekerja secara profesional dalam Penanganan Pelanggaran K3 demi Kota Cantik Palangka Raya.

O. Angka Konflik

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor penghambat ketercapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya beberapa kegiatan yang masih belum bisa terakomodir dengan baik, di karenakan efisiensi dan kurangnya waktu pelaksanaan.
2. Kurangnya kecermatan bidang-bidang dalam memperhatikan indikator dan target program dan kegiatan yang di susun.
3. Masih minimnya SDM yang mampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasi dengan baik Kurangnya kecermatan mengukur kinerja organisasi yang dapat dilihat dari kesesuaian realisasi kinerja dengan standar yang telah ditetapkan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya yaitu :

1. Dengan mengevaluasi kembali target pada indikator kinerja pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Melakukan koordinasi yang baik dengan bidang-bidang.

Dengan melakukan isu strategis yakni pengembangan kompetensi ASN Kalteng; kemiskinan dan stunting; Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); penanganan konflik lahan.

P. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri

Menurut analisis kami, bahwa peningkatan atau penurunan PDRB pada sektor Pertanian, Sektor Perdagangan dan Industri memiliki keterkaitan satu sama lain. Penyebab kegagalan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian di Kota Palangka Raya yakni:

1. secara garis besar masyarakat Kota Palangka Raya tidak berprofesi sebagai petani sehingga kurangnya perhatian serius dari Pemerintah dan menjadi salah satu alasan sulitnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian ini;
2. Faktor iklim yang mengakibatkan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian, contohnya berbagai macam cabai sehingga hal ini mengurangi ketersediaan (stok) di pasaran yang mengganggu penawaran pasar di tengah permintaan yang tinggi. sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat;
3. karena cuaca, kebutuhan bahan pokok itu mengalami kelangkaan akibat faktor produksi.

Kemudian peristiwa pembatasan ekspor beras, badai El Nino dan badai La Nina serta saat diterpa bencana alam yaitu banjir yang mana pemasokan bahan pangan ke kota palangka raya mengalami kendala yang sangat serius. Hal lain juga terjadi karena industri yang terindikasi melemahnya perekonomian global misalnya industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang galian bukan logam, serta industri furniture. untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah di Kota Palangkaraya, pihak terkait beserta pelaku ekonomi perlu memantau ketersediaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat Kota palangkaraya. Dikarenakan kelangkaan beras menyebabkan harga semakin meningkat yang menyebabkan kegiatan jual beli

menjadi menurun. Dan hal ini pun berdampak pada Industri dimana banyak produk yang di keluarkan namun minat beli masyarakat menurun karena lebih memprioritaskan pada pembelian bahan pokok seperti beras.

Solusi yang bisa diberikan antara lain :

1. Pentingnya peran Pemerintah dalam hal pemberian pupuk secara gratis kepada petani ataupun pemberian subsidi;
2. Melakukan Operasi pasar muran, Pasar penyeimbang agar harga barang stabil;
3. Memberikan bantuan peralatan dan sarana untuk pelaku UMKM;

Q. Nilai Investasi

Berikut akan dijabarkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi tahun 2023 serta solusi yang dianggap mampu memperbaiki kinerja agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta pelayanan yang prima (*excellent service*).

1) Permasalahan

- a. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi OSS-RBA. Berbagai upaya sudah dilakukan agar dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM sampai pada level yang bermakna. Meskipun demikian, belum bisa memperoleh hasil akhir yang memuaskan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM akan berbanding lurus dengan capaian realisasi penanaman modal sebagai indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Palangka Raya.
- b) Sebagai sistem pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan di luar OSS-RBA, Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) perlu terus diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan DPMPTSP Kota Palangka Raya. SIMYANDU harus didorong menjadi aplikasi pelayanan

perizinan dan non perizinan yang handal dan terintegrasi dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.

2) Solusi

- a) Dalam kaitannya dengan usaha untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM secara teratur, beberapa hal yang telah dilakukan. Pertama, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha agar mereka memahami secara teknis pelaporan LKPM dan memahami sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan tersebut. Kedua, melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha perihal pelaporan LKPM (dari segi kepatuhan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan). Ketiga, BKPM secara aktif dan masif memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar di OSS-RBA tentang kepatuhan pelaporan LKPM dan sanksinya melalui email masing-masing pelaku usaha. Pemberitahuan melalui penyebaran via pesan whatsapp juga bisa dilakukan karena hal itu merupakan alternatif yang murah dan ditangkan dengan mudah oleh para pelaku usaha.
- b) Dalam rangka menjadikan SIMYANDU sebagai sistem layanan yang handal dan terintegrasi perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadikan SIMYANDU sebagaimana diharapkan. SIMYANDU digunakan sebagai alat kerja oleh Bidang I dan II dalam pelayanan kepada masyarakat. Kedua bidang tersebut yang memiliki pemahaman seperti apa bentuk ideal dari SIMYANDU di masa depan guna memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat di satu sisi dan memiliki sistem layanan yang handal dan terintegrasi di sisi lain. Semua pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama dan menyampaikan pandangan mereka agar kemudian diperoleh catatan penting perihal poin-poin yang akan diperbaiki dari SIMYANDU.

6. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang mengkaitkan antara pengalokasian dana dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja adalah keluaran atau *output* dari suatu kegiatan baik berupa barang atau jasa yang dapat diukur kuantitas maupun kualitasnya. Kinerja juga diartikan sebagai sejauhmana “manfaat/hasil (*outcome*)” dari barang atau jasa tersebut bagi masyarakat pengguna layanan. Sehingga ketika Pemerintah Daerah dalam hal ini Perangkat Daerah mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatannya, ada 3 (tiga) hal yang harus diingat dan dipahami, yaitu:

- (1) apa hasil dan manfaat yang bisa diperoleh masyarakat pengguna layanan (*output and outcome oriented*), hal ini untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai;
- (2) tugas-fungsi Unit Kerja yang melekat pada struktur organisasi (*money follow function*) hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran; dan
- (3) fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

- A. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah suatu proses penyusunan anggaran yang terfokus pada pencapaian kinerja (*output dan outcome*). Selain itu penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah. Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah pendanaan difokuskan untuk menghasilkan *output* sehingga dapat dianalisis tingkat efisiensi dalam menghasilkan *output* dan tingkat efektifitas pencapaian *outcome*.
- B. Tata cara pengukuran dan penilaian Tingkat Efektifitas dan Tingkat Efisiensi menggunakan Formula sebagai berikut :

Tingkat Efektifitas =	$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \times 100\%$
------------------------------	---

Tingkat Efisiensi =	$\text{Persentase Rata-rata capaian sasaran} - \text{Persentase Realisasi Anggaran}$
----------------------------	--

TABEL
PERHITUNGAN EFEKTIFITAS OUTPUT PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-rata capaian sasaran	Persentase Realisasi anggaran	Tingkat Efektifitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (M1S1)	1	102,69%	96%	107%
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	1	110,21%	99,55%	111%
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	1	100%	96%	104%
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	1	100%	95%	105%
5.	Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan (M1S5)	3	112,15%	99%	113%
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	1	100,70%	80%	126%
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	2	116,68%	93%	125%
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	1	110,31%	95%	116%
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	1	48,75%	94%	52%
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	1	100%	93%	108%
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	2	100%	95%	105%
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	1	75%	93%	81%
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	2	40%	97%	41%
14.	Meningkatnya Sektor Perekonomian Strategis (M3S1)	3	56,86%	96%	59%
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	1	129,97%	93%	140%

TABEL
PERHITUNGAN EFESIENSI OUTPUT PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-rata capaian sasaran	Persentase Realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ke Pu an (M1S1)	1	102,69%	96%	6,69%
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	1	110,21%	99,55%	10,66%
3.	Meningkatnya Mobilitas Orang Dan Barang (M1S3)	1	100%	96%	4%
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	1	100%	95%	5%
5.	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan (M1S5)	3	112,15%	99%	13,15%
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	1	100,70%	80%	20,7%
7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	2	116,68%	93%	23,68%
8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	1	110,31%	95%	15,31%
9.	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	1	48,75%	94%	-45,25%
10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	1	100%	93%	7%
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	2	100%	95%	5%
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	1	75%	93%	-18%
13.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	2	40%	97%	-57%
14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	3	56,86%	96%	-39,14%
15.	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	1	129,97%	93%	36,97%

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program atau pun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Kota Palangka Raya antara lain :

NO	PROGRAM
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
13	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
24	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

NO	PROGRAM
	UMUM
25	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
26	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
27	<i>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</i>
28	<i>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</i>
29	<i>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</i>
30	<i>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</i>
31	<i>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</i>
32	<i>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</i>
33	<i>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</i>
34	<i>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</i>
35	<i>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</i>
36	<i>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</i>
37	<i>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</i>
38	<i>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</i>
39	<i>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</i>
40	<i>PROGRAM PENYELESAIAN KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</i>
41	<i>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</i>
42	<i>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</i>
43	<i>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</i>
44	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</i>
45	<i>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</i>
46	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</i>
47	<i>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</i>
48	<i>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</i>
49	<i>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</i>
50	<i>PROGRAM PENANGANAN PENGDUAN LIGKUNGAN HIDUP</i>

NO	PROGRAM
51	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
52	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
53	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
54	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
55	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
56	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
57	PROGRAM PEMBEDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
58	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
59	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
62	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
63	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
64	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
66	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
67	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
69	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
70	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
71	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
72	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
73	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
77	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
79	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
80	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
81	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

NO	PROGRAM
82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
83	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</i>
84	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</i>
85	<i>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>
86	<i>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</i>
87	<i>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA</i>
88	<i>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</i>
89	<i>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WISATA DAN EKONOMI KREATIF</i>
90	<i>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</i>
91	<i>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</i>
92	<i>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</i>
93	<i>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</i>
94	<i>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</i>
95	<i>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</i>
96	<i>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</i>
97	<i>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</i>
98	<i>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</i>
99	<i>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</i>
100	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>
101	<i>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</i>
102	<i>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</i>
103	<i>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</i>
104	<i>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i>
105	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</i>
106	<i>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</i>
107	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</i>
108	<i>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</i>
109	<i>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</i>
110	<i>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</i>
111	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</i>
112	<i>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</i>

NO	PROGRAM
113	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</i>
114	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i>
115	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
116	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</i>
117	<i>PROGRAM KOODINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
118	<i>PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAAN</i>
119	<i>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</i>
120	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</i>
121	<i>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</i>
122	<i>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGAN KONFLIK SOSIAL</i>

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen. Perancangan sistem pengendalian manajemen pada intinya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi yang selalu diharapkan dalam operasional manajemen.

Kinerja pelayanan publik merupakan indikator kinerja yang mendasari keberhasilan tujuan suatu Pemerintah Daerah yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka perlu adanya pendekatan yang dilakukan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, kinerja yang diukur bukan hanya pada kinerja keuangannya saja tetapi mencakup seluruh aspek dalam pelayanan publik. Pemerintah harus pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pada Tahun 2023 terdapat 122 Program dalam menunjang peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dimana ke 122 Program tersebut merupakan program prioritas

dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Palangka Raya seperti contohnya program-program yang berhubungan dengan peningkatan infrastruktur baik itu jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain. Serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan sosial dan lain-lain.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1); pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023			
Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	1.234.981.142.750,00	1.259.278.812.832,85	101,97%
Belanja Daerah	1.460.030.259.740,00	1.326.550.654.745,85	90,86%

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Untuk Belanja terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja tak terduga yang menjadi fokus perbandingan Akuntabilitas keuangan tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan pada poin Pendapatan daerah dimana di anggarkan sebesar 1.234.981.142.750 Rupiah mencapai realisasi sebesar 1.259.278.812.832,85 Rupiah dimana persentase capaiannya mencapai 101,97 %. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan daerah mengalami peningkatan dalam hal pendapatan pajak, retribusi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain.

Perbandingan belanja daerah pada tabel diatas secara kasat mata mengalami efesiensi dimana mencapai 90.86%. Dapat dikatan bahwa kinerja yang baik bukan hanya terealisasi 100% anggaran yang ada. Namun Efesiensi anggaran juga bisa menjadi tolak ukur suatu keberhasilan suatu kinerja pada Pemerintah Daerah.

**BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DI RAIH KOTA PALANGKA RAYA
UNTUK TAHUN 2023**

**1. Kota Palangka Raya menerima Penghargaan Universal Health
Coverage (UHC)**



 Disukai oleh seniati_ningsih92 dan 135 lainnya
kominfoplk Selamat dan Sukses kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas penghargaan Universal Health Coverage (UHC) pada UHC Award 14 Maret 2023.

17 Maret 2023

2. Kota Palangka Raya Meraih ADIPURA Tahun 2023



Selamat

KOTA PALANGKA RAYA
KEMBALI RAIH PENGHARGAAN

ADIPURA

Tahun 2023, **Kategori Kota Sedang** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

"Mari bersama jaga Kota Palangka Raya agar selalu bersih, sehat dan layak huni"

Dr. HERA NUGRAHAYU, M.Si.
Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA



 kominfo.palangkaraya.go.id  Kominfo Palangkaraya  [kominfoplk](https://www.instagram.com/kominfoplk)  [@kominfoplk](https://twitter.com/kominfoplk)



120 suka

kominfoplk Kota Palangka Raya kembali meraih Adipura Tahun 2023. Mari kita jaga dan kita tata bersama Kota Palangka Raya.

3. Kota Palangka Raya memperoleh Penghargaan Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap



Disukai oleh **adistyaanshori** dan 50 lainnya

prokompky Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menerima langsung Penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Kota dengan Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas Terbaik se Indonesia, bertempat Jakarta Convention Centre (JJC), Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

4. Kota Palangka Raya mendapatkan Predikat Tinggi pada Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik



5. Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh Penghargaan Media Center peringkat 2 Nasional



6. Pemerintah Kota Palangka Raya merai penghargaan Kategori Informatif dalam kategori Keterbukaan Informasi Badan Publik



7. Kota Palangka Raya menerima Penghargaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, adil, wajar, demokratis, dan responsif. Berdasarkan konsep tersebut terlihat bahwa good governance mempunyai tujuan yang lebih besar dari sekedar manajemen yang efisien dan penggunaan sumber daya yang ekonomis yaitu sangat berperan dalam penerapan kebijakan yang demokratis ditandai dengan meningkatnya juga pengendalian dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palangka Raya. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam upayanya untuk melaksanakan seluruh kinerja yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan tidak terlepas dari itikad baik pemerintah untuk selalu senantiasa meningkatkan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani seluruh elemen masyarakat dalam rangka bersama-sama mewujudkan cita-cita Kota Palangka Raya.

Pada tahun 2023 pencapaian indikator kinerja utama Kota Palangka Raya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU) pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 102,69%.
2. Indeks Kualitas Permukiman (IKPR) pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 110,21%;
3. Persentase Kecamatan Yang Terlayani Trasportasi Umum (TU) pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 100%;

4. Persentase Wilayah (Kelurahan) Yang Terkoneksi Jaringan Internet (TI) pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 100%;
5. Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 153,46%
6. Indeks Kualitas Air pada tahun ini masih belum mencapai target karena hanya mencapai realisasi 67,03%;
7. Indeks Kualitas Udara pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 115,96%;
8. Angka Harapan Hidup pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 100,70%;
9. Harapan Lama Sekolah pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 135,05%;
10. Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun ini masih belum mencapai target karena hanya mencapai realisasi hingga 98,31%;
11. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 110,31%;
12. Angka Kemiskinan pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 48,75%;
13. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun ini memiliki nilai/kategori B, dimana target adalah B dan telah mencapai realisasi hingga 100%;
14. Nilai Sakip pada tahun ini memiliki nilai/kategori B, dimana targetnya adalah B dan telah mencapai realisasi hingga 100%;
15. Opini Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun ini belum memiliki nilai karena masih proses penialain dari BPK;
16. Indeks kepuasan masyarakat pada tahun ini masih belum mencapai target karena hanya mencapai realisasi hingga 75%;
17. Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun ini menggunakan Persentase Pelanggaran K3 yang tertangani dimana capaian realisasinya sebesar 100%;
18. Angka Konflik yang tertangani pada tahun ini menggunakan Peringkat Nasional Indeks Toleransi dengan peringkat 33 sedangkan target yang ditetapkan adalah 15. Pencapaian peringkat 33 tersebut merupakan ranking

indeks kota toleransi seindonesia yang merupakan tindak lanjut perubahan indikator hasil dari evaluasi KEMENPAN RB;

19. Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian pada tahun ini belum mencapai target karena hanya mencapai realisasi hingga 36,88%;
20. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada tahun ini masih belum mencapai target karena hanya mencapai realisasi hingga 74,57%;
21. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pada tahun ini masih belum mencapai target karena hanya mencapai realisasi 59,13%;
22. Nilai Investasi pada tahun ini telah mencapai realisasi hingga 129,97%.

Dari pencapaian 22 Indikator Kinerja Utama di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Palangka Raya secara umum telah berhasil melaksanakan seluruh indikator yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pencapaian seluruh IKU tersebut pencapaiannya di atas 104,38%. Pencapaian kinerja yang telah terlaksana dengan baik maupun yang belum sepenuhnya dapat dicapai, telah memberikan pengalaman kepada jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas sistem dan mekanisme pengumpulan data kinerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang mana masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang.
- b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan, sasaran yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya

terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

- d. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
- e. Membuat kebijakan pemberian motivasi kerja berupa reward and punishment terhadap pelaksana di tingkat Perangkat Daerah yaitu memberikan reward kepada Perangkat Daerah yang kinerjanya mencapai/melebihi target serta memberikan punishment kepada Perangkat Daerah yang capaian kinerjanya tidak/belum/masih di bawah target.
- f. Menganggarkan dana yang memadai dan berkesinambungan dalam rangka memelihara dan mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring akuntabilitas secara elektronik (E-SAKIP), yang selanjutnya dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi elektronik lainnya yang telah dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Segenap jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Nomor : B/ 482 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya**
di

Palangka Raya

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menindaklanjuti sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Seluruh laporan pemerintah Kota Palangka Raya maupun laporan akuntabilitas kinerja PD telah dipublikasikan melalui website Pemerintah Kota maupun *website* Perangkat Daerah;
- b. Seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat guna peningkatan kualitas hasil laporan yang lebih baik.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa nilai sebesar **62,08** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	21.94	22.20
b. Pengukuran Kinerja	30	17.92	17.88
c. Pelaporan Kinerja	15	11.03	11.04
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10.80	10.96
Nilai Hasil Evaluasi	100	61.69	62.08
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Kepatuhan penyampaian dokumen perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya belum berjalan baik. Hal ini terlihat dari masih terdapat Perangkat Daerah (PD) yang belum menyampaikan dokumen perencanaan kinerja terbarunya seperti Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- b) *Cascading* kinerja yang telah disusun belum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
- c) Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya telah berorientasi hasil (*outcome*) dan memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*) terutama pada kriteria *specific, measurable, dan relevant*. Salah satu contoh terdapat pada perencanaan Wali Kota Palangka Raya dengan sasaran strategis “Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang” dengan indikator kinerja “Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi”;
- d) Belum terlihat identifikasi *crosscutting* kinerja yang baik sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama PD.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dokumen Indikator Kinerja Utama pada Level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerja untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
- b) Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih lebih diorientasikan pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dalam laporan kinerja level pemerintah daerah, terdapat beberapa indikator yang realisasinya berada dibawah 75 persen yaitu “Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian” dan “Pertumbuhan PDRB Sektor Industri”;
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup seperti “Indeks Kualitas Udara” pada indikator kinerja level Pemda;
- c) Laporan kinerja khususnya pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang mengacu pada pelaporan kinerja, sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar. Laporan kinerja juga belum melakukan perbandingan dengan capaian nasional serta belum melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian kecil kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai;
- b) Monitoring atas temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada PD belum dilakukan secara berkala.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Palangka Raya agar melakukan pembaruan dokumen perencanaan setiap tahunnya baik pada portal resmi instansi maupun portal E-SAKIP Reviu (<https://esr.menpan.go.id>) sebagai bentuk komitmen instansi dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP yang lebih baik;
- 2) Memperbaiki kualitas penjabaran kinerja dengan berdasarkan kerangka berpikir logis sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti : memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*). Kemudian, memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) terutama pada kriteria *specific, measurable, dan relevant*;
- 4) Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* dalam upaya untuk mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal;
- 5) Melakukan reviu dokumen Indikator Kinerja Utama pada Level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah serta memastikan dokumen IKU dilengkapi dengan definisi operasional dan sumber data yang jelas;
- 6) Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- 7) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 8) Menjadikan capaian indikator kinerja baik yang belum berada di bawah 75 persen maupun yang sudah berada di atas kategori tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
- 9) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja laporan kinerja tahun sebelumnya;
- 10) Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- 11)Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan permasalahan nyata dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 12)Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Palangka Raya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Wali Kota Palangka Raya.